



# **RENCANA STRATEGIS DAN AKSI NASIONAL JANTUNG KALIMANTAN 2015-2019**

**KELOMPOK KERJA NASIONAL - JANTUNG KALIMANTAN**

2014



**RENCANA STRATEGIS DAN AKSI NASIONAL  
JANTUNG KALIMANTAN  
2015-2019**

KELOMPOK KERJA NASIONAL - JANTUNG KALIMANTAN

© Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2014

Penulis: Tonny Soehartono  
Ani Mardiasuti

Foto Sampul (dari kiri ke kanan)

*Sampul depan:*

Ngurah Pradnyana  
Paulina Maria Herani  
Wilson Umar  
Mohamad Mardano  
Hamzah

*Sampul belakang:*

Sugeng Hendratno  
Didiek S  
Susiana  
Theonila  
WWF

ISBN 978-954-400-616-7



9 789544 006167



## KATA PENGANTAR

Perkenankan saya untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah s.w.t. karena atas kehendak dan karuniaNya, maka dokumen Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) 2015-2019 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini tentu saja sangat penting bagi kami – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian – sebagai panduan bagi Kementerian, provinsi dan kabupaten terkait untuk menggerakkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di kawasan Jantung Kalimantan.

Saya juga ingin menekankan kembali bahwa walau gagasan tentang Jantung Kalimantan ini berawal dari konservasi keanekaragaman hayati antar ketiga negara di Pulau Kalimantan, dari visi bersama tampak jelas bahwa konservasi keanekaragaman hayati harus berjalan seiring dengan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, sasaran dan misi Jantung Borneo perlu pula diperluas dan bahkan difokuskan pada kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut, antara lain melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, penyediaan sarana pendidikan yang baik, serta didukung oleh infrastruktur yang ramah lingkungan.

Periode masa berlaku dokumen ini bersamaan dengan periode Rencana Strategis Nasional Indonesia 2015-2019, yang nantinya akan diimplementasikan oleh pemerintah yang baru. Oleh karenanya, kita harus dapat mengintegrasikan elemen yang penting dalam dokumen ini ke dalam Rencana Strategis Nasional. Untuk implementasi program, tentunya diperlukan koordinasi antar para pemangku-kepentingan pada tingkatan nasional dan lokal/regional, sehingga sinergi program antar sektor, provinsi dan kabupaten dapat terlaksana dengan baik.

Terkait pendanaan, saya perlu menggaris bawahi perlunya efisiensi, akuntabilitas, transparansi dan ketaatan pada aturan yang berlaku. Kegiatan yang akan dilaksanakan perlu diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah atau sesuai tahapan pembangunan. Selain itu, kita perlu mencari titik temu porsi pendanaan antara pemerintah pusat dan provinsi/kabupaten. Dalam jangka panjang, saya sangat merekomendasikan untuk mencari kemungkinan dukungan pendanaan yang lestari. Dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan di Jantung Borneo dapat menjadi awal yang baik untuk menggalang pendanaan lestari.

Akhirnya, saya ingin mengajak semua pemangku-kepentingan yang terkait dengan Jantung Kalimantan untuk mendedikasikan pemikiran dan dukungan lainnya untuk membangun kawasan Jantung Borneo secara berkelanjutan. Semoga Allah s.w.t. memberikan rahmatNya kepada kita untuk membangun Jantung Kalimantan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Chairul Tanjung

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTW	Daerah Tujuan Wisata
ESDM	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
HHBK	Hasil Hutan Bukan Kayu
HoB	Heart of Borneo
IDR	Indonesian Rupiah
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IUPHHK	Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu
IUPHTI	Ijin usaha Pengelolaan Hutan Tanaman Industri
ISPO	Indonesian Sustainable Palm Oil System
KAPET	Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
Kepres	Keputusan Presiden
KPH	Kesatuan Pengelolaan Hutan
KSN	Kawasan Strategis Nasional
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MoU	Memorandum of Understanding
MP3EI	Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia
NSPA	National Strategic Plan of Action
Padiatapa	Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
RSPO	Roundtable for Sustainable Palm Oil
SFM	Sustainable Forest Management
SPA	Strategic Plan of Action
UU	Undang-Undang
WWF	World Wide Fund for Nature

## DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
1. LATAR BELAKANG	1
2. TUJUAN	1
3. RUANG LINGKUP	1
4. VISI	2
5. MISI	2
6. TAHAPAN ANALISA	2
II. KONDISI KAWASAN JANTUNG KALIMANTAN	5
1. BATAS-BATAS	5
2. KONDISI FISIK	6
3. SUMBERDAYA ALAM	7
4. PEMBANGUNAN BERBASIS LAHAN	7
5. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)	8
6. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN	8
7. MASYARAKAT	10
8. KAWASAN STRATEGIS NASIONAL	11
III. PEMANGKU-KEPENTINGAN, PERAN DAN HAK BICARA	13
1. IDENTIFIKASI PEMANGKU-KEPENTINGAN	13
2. ISU PENTING	16
3. PENDEKATAN MANAJEMEN	18
IV. PROGRAM	21
V. PENDEKATAN STRATEGIS	33
1. DAMPAK DAN POTENSI DAMPAK TERHADAP PROGRAM	35
2. BATAS RENTANG PENGELOLAAN	35
3. PENDEKATAN PELAKSANAAN PROGRAM	35
LAMPIRAN	45

## DAFTAR TABEL

1	Luas kawasan Jantung Kalimantan di Indonesia berdasarkan luas provinsi dan kabupaten	5
2	Beberapa statistik penting terkait penduduk di kawasan Jantung Kalimantan	8
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM), <i>gini ratio</i> , jumlah penduduk miskin, batas garis kemiskinan, dan rata-rata APBD untuk setiap kabupaten di kawasan Jantung Kalimantan	9
4	PDRB dan peningkatannya, pendapatan rata-rata dan kontributor utama terhadap PDRB kabupaten yang berada di dalam kawasan Jantung Kalimantan	10
5	Daftar pemangku-kepentingan dan peran masing-masing	14
6	Isu yang teridentifikasi di kawasan Jantung Kalimantan	17
7	Kriteria untuk memilih isu penting di kawasan Jantung Kalimantan	17
8	Isu penting yang perlu ditangani di kawasan Jantung Kalimantan	18
9	Matriks kegiatan untuk Program 1: Persiapan untuk implementasi dan akselerasi program di Jantung Kalimantan	22
10	Matriks kegiatan untuk Program 2: Pembangunan sumberdaya alam di luar kawasan lindung secara berkelanjutan di Jantung Kalimantan	24
11	Matriks kegiatan Program 3: Pengelolaan kawasan lindung	27
12	Matriks kegiatan Program 4: Pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah lintas-batas	29
13	Matriks kegiatan Program 5: Pengembangan ekowisata	31
14	Matriks kegiatan Program 6: Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	33
15	Potensi dampak yang diakibatkan oleh program Jantung Kalimantan	36
16	Batas rentang pengelolaan ( <i>span of control</i> ) oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk program dan kegiatan di Jantung Kalimantan	41

## DAFTAR GAMBAR

1	Tahapan analisa perumusan Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan	3
2	Penentuan batas kawasan Jantung Kalimantan di wilayah Indonesia berdasarkan wilayah administrasi: penentuan batas pertama pada tahun 2007 (kiri) dan penentuan batas terakhir (kanan)	6
3	Pemetaan pemangku-kepentingan, berdasarkan analisa antara kewenangan dan ketergantungan setiap pemangku-kepentingan terhadap kawasan Jantung Kalimantan	6
4	Pemetaan isu, dianalisa berdasarkan kepentingan para pemangku-kepentingan dan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan alam dan sosial di kawasan Jantung Kalimantan	19
5	Kerangka kerja Program 1: Persiapan untuk implementasi dan akselerasi program di Jantung Kalimantan	21
6	Kerangka kerja Program 2: Pembangunan sumberdaya alam di luar kawasan lindung secara berkelanjutan di Jantung Kalimantan	23
7	Kerangka kerja Program 3: Pengelolaan kawasan lindung	26
8	Kerangka kerja Program 4: Pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah lintas-batas	28
9	Kerangka kerja Program 5: Pengembangan ekowisata	30
10	Kerangka kerja Program 6: Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	32
11	Pendekatan implementasi strategis untuk program di Jantung Kalimantan	43

## DAFTAR LAMPIRAN

1	Daftar provinsi, kabupaten dan kecamatan yang berada di dalam kawasan Jantung Kalimantan	46
2	Penyebaran konsesi hutan (IUPHHK) di kawasan Jantung Kalimantan	47
3	Penyebaran Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan Jantung Kalimantan	48
4	Penyebaran perkebunan kelapa sawit di kawasan Jantung Kalimantan	49
5	Penyebaran konsesi pertambangan batubara di kawasan Jantung Kalimantan	50
6	Nilai untuk pemetaan pemangku-kepentingan berdasarkan kewenangan dan ketergantungan	51
7	Nilai untuk pemetaan isu berdasarkan kepentingan terhadap pemangku-kepentingan dan dampak terhadap ekonomi, lingkungan alam dan sosial	51



Robertus Tutong

# I. PENDAHULUAN

## 1. LATAR BELAKANG

Inisiatif Jantung Kalimantan (*The Heart of Borneo Initiative*) merupakan program konservasi dan pengelolaan sumberdaya secara lestari, yang telah disepakati oleh tiga negara bertetangga (Brunei Darussalam, Malaysia and Indonesia), dengan tujuan untuk memperoleh pengelolaan lestari terhadap wilayah di Borneo seluas sekitar 265,000 km<sup>2</sup> (26.5 juta ha)<sup>1</sup>. Inisiatif ini telah disepakati dan diumumkan oleh Menteri tiga negara tersebut pada pertemuan para Menteri (*Ministerial Meeting*) yang diselenggarakan di Denpasar pada tanggal 12 Februari 2007. Selanjutnya, pada *Trilateral Meeting* yang diadakan di Pontianak, pada tanggal 4-5 April 2008, ketiga negara telah menyetujui dokumen *Strategic Plan of Action (SPA) of Heart of Borneo* sebagai arahan bagi ketiga negara anggota dalam mengembangkan Rencana Strategis dan Aksi Nasional (*National Strategic Plan of Action; NSPA*) oleh masing-masing negara.

Setelah dokumen SPA disepakati, Indonesia telah merumuskan dan menyetujui Rencana Strategis dan Aksi Nasional untuk Jantung Kalimantan di Kalimantan pada bulan Juli 2008<sup>2</sup>, sebagai kerangka kerja nasional untuk sektor, provinsi dan kabupaten, serta untuk para pemangku-kepentingan yang relevan di wilayah Jantung Kalimantan. Masa berlaku Rencana Strategis dan Aksi Nasional adalah tahun 2008 hingga 2014. Mengingat bahwa masa berlaku Rencana tersebut akan segera berakhir, maka diperlukan rencana baru, yang disesuaikan dengan kondisi terkini dan prediksi masa depan di wilayah Jantung Kalimantan.

## 2. TUJUAN

Tujuan penulisan dokumen Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan 2015-2019 ini adalah untuk memberikan pedoman dan arahan yang jelas kepada para pemangku-kepentingan dan pelaku inti dalam melaksanakan kegiatan konservasi dan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah Jantung Kalimantan yang berada dalam negara Indonesia.

## 3. RUANG LINGKUP

Dalam Rencana Strategis dan Aksi Nasional ini disajikan arahan program dan kegiatan kunci yang telah disepakati sebagai misi Jantung Kalimantan (Heart of Borneo, HoB), yang sesuai dengan program sektor pemerintah, provinsi dan kabupaten yang terletak dalam kawasan Jantung Kalimantan di Indonesia. Kawasan Jantung Kalimantan Indonesia mencakup 17 kabupaten yang terletak di dalam empat provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat<sup>3</sup>. Mengingat bahwa rencana yang akan disajikan merupakan pendekatan sektoral dan ada pula yang berupa pendekatan regional/lokal, maka program dan kegiatan kunci ditentukan berdasarkan isu penting yang terjadi atau dapat terjadi di kawasan Jantung Kalimantan. Masa berlaku Rencana Strategis dan Aksi Nasional ini adalah Januari 2015 hingga Desember 2019.

---

<sup>1</sup> The Heart of Borneo Strategic Plan of Action: Bridging Conservation and Sustainable Management in Three Countries. Heart of Borneo Ministerial Meeting, 12 February 2007, Bali Indonesia.

<sup>2</sup> National Strategic Plan of Action of Heart Borneo Indonesia. Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia, 2008.

<sup>3</sup> Profil Fisik dan Ekosistem Kawasan Heart of Borneo, WWF File-dokumen tidak dipublikasikan.

#### 4. Visi

Visi Jantung Kalimantan yang telah disepakati pada Ministerial Meeting pertama di Bali tahun 2007 adalah:

“Menjembatani konservasi dan pembangunan berkelanjutan di tiga negara”

Visi ini akan tetap dipakai kecuali jika ketiga negara memutuskan untuk meninjau ulang atau memperbaiki visi tersebut.

#### 5. Misi

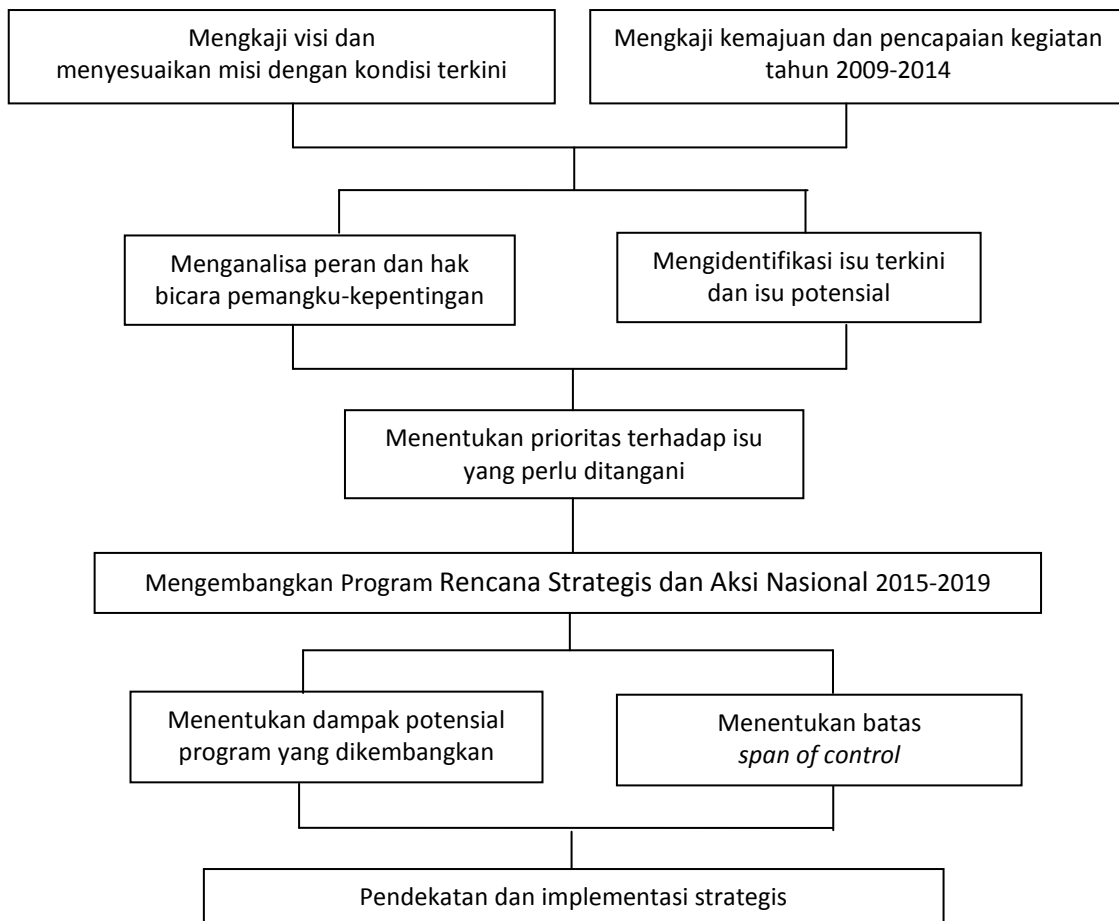
Sama halnya dengan visi, misi Jantung Kalimantan juga akan tetap dipergunakan sesuai dengan kesepakatan *Ministerial Meeting* pada tahun 2007 di Bali. Misi yang disajikan di bawah ini merupakan misi yang telah disepakati bersama untuk kawasan Jantung Kalimantan. Namun demikian, untuk kawasan Jantung Kalimantan yang berada di wilayah negara Indonesia dan mengingat pula prinsip kedaulatan negara, maka terhadap misi ketiga (kesejahteraan sosial-ekonomi) dan misi keempat (pengembangan ekowisata) telah dilakukan sedikit penyesuaian agar cocok dengan kebutuhan masyarakat lokal terkini dan kondisi ekowisata di Indonesia.

Berikut adalah misi Rencana Strategis dan Aksi Nasional untuk Jantung Kalimantan:

- 1) Mengelola sumberdaya alam di luar dan di dalam jejaring kawasan lindung melalui pengembangan dan implementasi tataguna lahan yang lestari;
- 2) Meningkatkan dan mengedepankan pengelolaan kawasan lindung yang efektif, dengan memprioritaskan kawasan lindung yang terletak di perbatasan, dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati hutan dan keterkaitan sistem ekologi;
- 3) Mengelola isu kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan;
- 4) Mengenali, melestarikan, mempromosikan dan memanfaatkan secara lestari keindahan tempat-tempat alami serta wilayah bernilai budaya tinggi di kawasan Jantung Kalimantan; dan
- 5) Memastikan implementasi yang efektif terhadap Inisiatif Jantung Kalimantan untuk semua kalangan, termasuk untuk kalangan publik, swasta, serta masyarakat lokal.

#### 6. TAHAPAN ANALISA

Rencana Strategis dan Aksi Nasional 2015-2019 ini dirumuskan berdasarkan enam tahap dan masing-masing tahap disajikan dalam Gambar 1. Setiap tahap dikaji berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan *triple bottom lines* (yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan), disesuaikan dengan kebutuhan dan peran pemangku-kepentingan yang terkait.



Gambar 1. Tahapan analisa perumusan Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan.



Yusni

## II. KONDISI KAWASAN JANTUNG KALIMANTAN

### 1. BATAS-BATAS

Sesuai dengan keputusan pertemuan Jantung Kalimantan pada tahun 2009, kawasan Jantung Kalimantan secara administratif terletak di empat provinsi: Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang baru, ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2012. Semua wilayah yang berada di Provinsi Kalimantan Utara ini sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Timur.

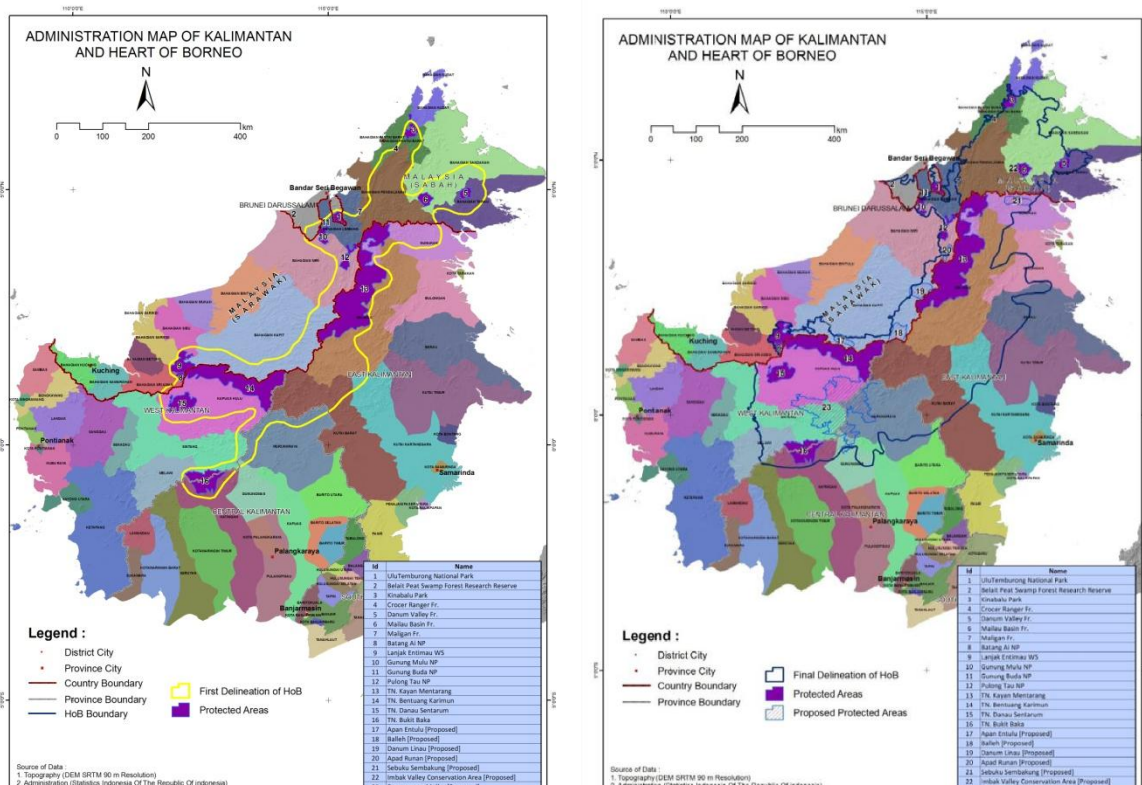
Luas wilayah Jantung Kalimantan mencakup areal sekitar 16,8 juta ha, tersebar di 17 kabupaten and 82 kecamatan. Salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, adalah kabupaten yang baru diresmikan pada bulan Januari 2013. Kabupaten ini sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Kutai Barat. Hingga kini Kabupaten baru tersebut belum memiliki data terkait ekonomi, populasi dan data lain (lihat Tabel 1 and Lampiran 1).

Tabel 1. Luas kawasan Jantung Kalimantan di Indonesia berdasarkan luas provinsi dan kabupaten.

Provinsi	Kabupaten	Luas (ha)
Kalimantan Utara	Nunukan	956.642,93
	Malinau	3.493.256,73
	Bulungan	552.591,30
Total Kalimantan Utara (%)		5.002.490,96 (29,8%)
Kalimantan Timur	Berau	651.586,35
	Kutai Timur	394.131,54
	Kutai Kartanegara	850.097,32
	Kutai Barat	1.977.054,42
	Mahakam Ulu*	b.t.
Total Kalimantan Timur (%)		3.872.869,63 (23,1%)
Kalimantan Tengah	Murung Raya	2.038.698,14
	Kapuas	127.376,81
	Gunung Mas	250.701,89
	Katingan	530.489,83
	Barito Utara	42.873,04
	Seruyan	34.336,15
Total Kalimantan Tengah (%)		3.024.475,85 (18,0%)
Kalimantan Barat	Kapuas Hulu	3.088.025,81
	Melawi	432.305,69
	Sintang	1.372.187,48
Total Kalimantan Barat (%)		4.892.518,99 (29,1%)
<b>Total Kalimantan</b>		<b>16.792.355,43</b>

\* baru diresmikan pada tanggal 11 January 2013 melalui UU no. 2/2013, mencakup area seluas 15.315 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk 28.000 orang, sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Kutai Barat.

b.t.: data belum tersedia



Gambar 2. Penentuan batas kawasan Jantung Kalimantan di wilayah Indonesia berdasarkan wilayah administrasi: penentuan batas pertama pada tahun 2007 (kiri) dan penentuan batas terakhir (kanan).

Sumber peta: WWF Indonesia.

Penentuan batas kawasan Jantung Kalimantan sesungguhnya telah dilakukan sebanyak tiga kali. Kawasan Jantung Kalimantan ini telah bertambah luas sejak dilakukan penentuan batas pada tahun 2007, jika dibandingkan dengan penentuan batas yang terakhir (ketiga) pada tahun 2009 (lihat Gambar 2).

## 2. KONDISI FISIK

Kawasan Jantung Kalimantan di Indonesia kebanyakan terletak di sepanjang jajaran perbukitan Kalimantan sebelah utara. Di kawasan ini terdapat 13 wilayah perbukitan dengan ketinggian bervariasi antara 1.681 m dpl di Gunung Cemaru di Kalimantan Barat hingga 2.987 m dpl di Gunung Makita di Taman Nasional Kayan Mentarang. Kondisi topografi di wilayah Jantung Kalimantan kebanyakan berupa tebing terjal. Kawasan ini juga memiliki tiga danau besar: Danau Jempang (15.000 ha), Danau Semayang (13.000 ha) dan Danau Melintang (11.000 ha).

Kondisi iklim sangat dipengaruhi oleh iklim monsoon yang basah dengan curah hujan tahunan bervariasi antara 2.800 mm to 3.600 mm dan suhu udara bervariasi antara 22°C selama musim penghujan pada bulan September hingga Maret, dan 33°C selama musim kemarau pada bulan April sampai Agustus. Kelembaban udara berkisar antara 85%-88% sepanjang tahun<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Profil Fisik dan Ekosistem Kawasan Heart of Borneo, WWF File-laporan tidak dipublikasikan.

### 3. SUMBERDAYA ALAM

Kawasan Jantung Kalimantan di Indonesia terbentang sepanjang perbatasan Kalimantan dan negara bagian Sarawak dan Sabah di Malaysia, yang kemudian diperluas hingga ke wilayah tangkapan air Pulau Kalimantan (Borneo). Kawasan Jantung Kalimantan seluas 16,8 juta ha ini kebanyakan ditutupi oleh hutan pegunungan tropis. Kawasan ini sesungguhnya merupakan koridor keanekaragaman hayati yang amat kaya, menghubungkan empat kawasan konservasi dengan luas total mencapai 4,465 juta ha: Taman Nasional Kayan Mentarang, Taman Nasional Danau Sentarum, Taman Nasional Bukit Baka - Bukit Raya, dan Taman Nasional Betung Kerihun.

Kawasan konservasi yang luasnya sekitar 40,89% dari Jantung Kalimantan merupakan habitat yang sangat penting bagi ribuan spesies tumbuhan dan bagi sekitar 900 spesies satwaliar, menjadikan Kalimantan sebagai wilayah yang memiliki kekayaan spesies tertinggi di Indonesia. Spesies satwaliar yang ditemukan di kawasan tersebut antara lain adalah 221 spesies mamalia, 358 spesies burung penetap dan 254 spesies reptilia. Sekitar 34% dari spesies ini merupakan spesies endemik Kalimantan, termasuk Orangutan Kalimantan *Pongo pygmaeus* and Gajah Kerdil *Elephas maximus borneensis*.

Kawasan konservasi tersebut juga memiliki fungsi sangat penting sebagai daerah tangkapan air bagi 14 sungai utama di Kalimantan (sembilan Daerah Aliran Sungai dan delapan sub-Daerah Aliran Sungai), diantaranya adalah Sungai Mahakam, Sungai Barito, Sungai Kahayan, Sungai Katingan, Sungai Sesayap, Sungai Sembakung, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas, semuanya menyediakan air dan mengatur tata air ke bagian hilir di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat<sup>5</sup>.

### 4. PEMBANGUNAN BERBASIS LAHAN

Di Kawasan Jantung Kalimantan terdapat sekitar 9,08 juta ha hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas. Namun demikian, mengingat elevasinya yang tinggi dan kondisinya yang terjal, hampir semua hutan produksi tersebut hanya dapat dipanen dengan sangat hati-hati dan dengan jumlah terbatas. Saat ini jumlah konsesi IUPHHK yang melakukan kegiatan di Jantung Kalimantan berjumlah 79 unit (Lampiran 2), dimana 10 unit diantaranya merupakan Hutan Tanaman Industri (HTI) (Lampiran 3). Wilayah konsesi IUPHHK ini mencakup areal seluas 4,48 juta ha hutan produksi tetap dan terbatas.

Sebagian dari kawasan Jantung Kalimantan seluas 1,7 juta ha, khususnya areal dataran rendah, telah dialokasikan untuk pembangunan non-kehutanan. Dari areal tersebut, sekitar 658.000 ha telah direncanakan untuk penanaman kelapa sawit. Saat ini terdapat 47 perusahaan kelapa sawit yang terdaftar di kawasan Jantung Kalimantan (Lampiran 4).

Kawasan Jantung Kalimantan juga kaya akan sumberdaya yang tidak dapat pulih, khususnya mineral, seperti emas dan batubara. Kini terdapat 486 perusahaan pertambangan yang terdaftar melakukan kegiatan penambangan di kawasan Jantung Kalimantan pada kawasan seluas 2,05 juta ha, 11 perusahaan diantaranya merupakan perusahaan batubara yang besar. Wilayah Kalimantan dikenal memiliki cadangan batubara yang tinggi: 25.131 juta ton di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, 1.227 juta ton di Kalimantan Tengah, dan 527 juta ton di Kalimantan Barat.

Terdapat indikasi bahwa beberapa wilayah konsesi, misalnya hutan, kelapa sawit and pertambangan, ternyata tertumpang-tindih satu sama lain. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antar sektor yang diberi mandat untuk mengeluarkan ijin operasi berbasis lahan tersebut. Akhir-akhir ini

---

<sup>5</sup>Kelompok Kerja Nasional Heart of Borneo; Laporan tidak dipublikasikan.

Pemerintah juga telah mendelegasikan penerbitan ijin untuk pertambangan skala kecil kepada Bupati<sup>6</sup>, yang menyebabkan lebih rumitnya koordinasi dalam mengembangkan kegiatan berbasis lahan serta dalam melaksanakan monitoring lingkungan dan dampak sosial yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan.

## **5. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH)**

Pelaksanaan pembentukan KPH di Indonesia dimandatkan melalui UU No. 41/1999<sup>7</sup> tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No. 44/2004<sup>8</sup> tentang Perencanaan Kehutanan. Selanjutnya pada tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 3/2008<sup>9</sup> tentang Tata Hutan menetapkan bahwa seluruh kawasan hutan di Indonesia harus dikelola berdasarkan sistem KPH. Hingga tahun 2014 Kementerian Kehutanan telah menargetkan sejumlah 120 KPH di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 6 KPH terdapat di Kalimantan. Dalam jangka panjang, Kementerian Kehutanan telah merencanakan menetapkan 86 KPH di seluruh wilayah Kalimantan.

## **6. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN**

Wilayah Jantung Kalimantan dihuni oleh lebih dari 3,2 juta orang (Tabel 2). Dari statistik masing-masing kabupaten di Jantung Kalimantan terungkap bahwa terdapat kesenjangan yang tinggi antar kabupaten dalam hal kepadatan penduduk, pendidikan, jumlah penduduk miskin, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan pendapatan per kapita (Tabel 2, 3, 4).

Pertumbuhan populasi penduduk di kabupaten pada kawasan Jantung Kalimantan tampaknya perlu diwaspadai. Dari 17 kabupaten di Jantung Kalimantan, hanya 6 kabupaten yang memperlihatkan pertumbuhan yang besarnya sama atau lebih rendah dari angka nasional, sementara 11 kabupaten lainnya memiliki laju pertumbuhan yang dikategorikan tinggi hingga sangat tinggi. Kabupaten yang perlu mendapat perhatian adalah Nunukan, Malinau, Bulungan, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Murung Raya, dan Gunung Mas. Laju pertumbuhan populasi di kabupaten-kabupaten ini melebihi 4% per tahun. Selain itu, data *sex ratio* (nisbah laki-laki terhadap perempuan) secara umum di kawasan Jantung Kalimantan menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dari pada perempuan (Tabel 2), kemungkinan akibat banyaknya jumlah laki-laki yang hijrah ke wilayah tersebut untuk bekerja di pertambangan atau perkebunan kelapa sawit.

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 2010 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah no. 1 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010.

<sup>7</sup> Undang-Undang Kehutanan no. 41 tahun 1999.

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah no. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah no. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Tabel 2. Beberapa statistik penting terkait penduduk di kawasan Jantung Kalimantan (dihimpun dari beberapa sumber, data selama tiga tahun terakhir).

No	Kabupaten	Populasi	Kepadatan per Km <sup>2</sup>	Pertumbuhan (%)	Sex Ratio	Jumlah Umur Produktif	Pendidikan* (%)
1	Nunukan	146.286	10,71	9,53	115,1	92.643	72,47
2	Malinau	83.339	1,63	18,18	118,0	30.685	71,34
3	Bulungan	123.800	9,15	4,00	115,1	81.497	87,40
4	Berau	179.079	**8,15	2,47	117,1	122.418	69,98
5	Kutai Timur	253.847	4,74	4,08	119,0	174.294	75,11
6	Kutai Kartanegara	674.464	22,99	4,13	110,0	456.274	71,26
7	Kutai Barat	184.394	5,83	1,92	112,5	94.460	66,60
8	Mahakam Ulu	b.t.	b.t.	b.t.	b.t.	b.t.	b.t.
9	Murung Raya	100.100	4,00	7,46	102,0	60.220	20,17
10	Kapuas	329.646	21,97	0,93	104,0	74.440	n.a.
1	Gunung Mas	100.157	9,27	17,36	113,2	52.489	42,15
12	Katingan	146.439	8,58	2,81	110,0	66.211	31,94
13	Barito Utara	123.781	15,00	1,36	108,0	62.916	41,55
14	Seruyan	149.915	8,96	3,26	116,3	94.146	n.a.
15	Kapuas Hulu	231.512	8,00	1,80	104,0	116.291	52,40
16	Melawi	187.003	18,00	1,65	101,0	97.792	43,07
17	Sintang	195.267	17,00	1,80	107,0	202.488	32,28
Rata-rata		200.564,3	9,50	4,91	110,76	111.575,8	55,55
Total		3.209.029				1.785.212	

\*Pendidikan hingga setara SMP (9 tahun), data Nunukan dimulai tahun 2004

\*\*dibandingkan dengan wilayah daratan; b.t.: data belum tersedia

Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), *gini ratio*, jumlah penduduk miskin, batas garis kemiskinan, dan rata-rata APBD untuk setiap kabupaten di kawasan Jantung Kalimantan (dihimpun dari berbagai sumber).

No	Kabupaten	IPM	Gini Ratio	Jumlah Penduduk Miskin <sup>10</sup>	Batas Garis Kemiskinan (IDR)	Rata-rata APBD 5 Tahun Terakhir (Trilyun IDR)
1	Nunukan	74,38	0,27	14.043	260.990	1,239
2	Malinau	73,26	0,25	10.559	360.485	1,384
3	Bulungan	75,11	0,24	16.475	248.653	1,670
4	Berau	75,56	0,38	11.847	302.117	1,325
5	Kutai Timur	72,05	0,15	28.916	300.108	2,153
6	Kutai Kartanegara	72,89	0,22	58.544	272.835	6,798
7	Kutai Barat	73,69	0,22	15.267	312.192	1,882
8	Mahakam Ulu	b.t.	b.t.	b.t.	b.t.	b.t.
9	Murung Raya	72,84	0,35	6.838	272.809	0,804
10	Kapuas	73,60	0,33	20.702	n.a.	0,455
11	Gunung Mas	73,43	0,35	7.807	277.660	0,674
12	Katingan	72,65	0,35	10.687	264.374	0,850
13	Barito Utara	75,15	0,35	8.684	267.603	0,799
14	Seruyan	72,55	0,33	14.692	n.a.	0,531
15	Kapuas Hulu	70,52	0,38	22.500	290.026	0,977
16	Melawi	69,57	0,38	22.627	239.162	0,428
17	Sintang	69,32	0,38	31.446	239.162	0,764
Rata-rata		72,91	0,294	18.852,1	279.155,4	1.420,8
Total				301.634		

b.t.: data belum tersedia.

<sup>10</sup> Sistem Informasi Statistik Pembangunan Daerah Tertinggal. <http://kpdt.bps.go.id>; Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Propinsi Kalimantan Tengah. <http://data.tnp2k.go.id>;

Walau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di semua kabupaten dalam kawasan Jantung Kalimantan relatif tinggi (kebanyakan lebih dari 70%), jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan lebih dari sembilan tahun ternyata masih relatif sedikit. Di beberapa kabupaten, persentase penduduk yang memperoleh pendidikan minimal selama sembilan tahun dapat melebihi 70%. Namun demikian, di beberapa kabupaten lain, penduduk yang memperoleh pendidikan setidaknya sembilan tahun masih kurang dari 50% dan bahkan hanya mencapai 20%. Untuk sektor pendidikan ini, perhatian yang khusus perlu diberikan kepada Kabupaten Murung Raya, Gunung Mas, Katingan, Barito Utara, Melawi dan Sintang (Tabel 2 dan Tabel 3).

Tabel 4. PDRB dan peningkatannya, pendapatan rata-rata dan kontributor utama terhadap PDRB kabupaten yang berada di dalam kawasan Jantung Kalimantan (dihimpun dari berbagai sumber).

No	Kabupaten	PDRB (IDR Milyar)	Peningkatan PDRB	Pendapatan Rata-Rata (IDR Juta)	Kontributor Utama terhadap PDRB
1	Nunukan	5,362	7,13	31.860.071	Pertambangan dan pertanian
2	Malinau	2,772	10,26	35.898.533	Pertambangan dan pertanian
3	Bulungan	3,010	9,38	26.095.000	Pertambangan dan pertanian
4	Berau	10,761	8,03	56.106.820	Pertambangan dan pertanian
5	Kutai Timur	54,580	3,43	184.346.000	Pertambangan
6	Kutai Kartanegara	29,084	4,00	189.712.083	Pertambangan
7	Kutai Barat	8,946	7,85	51.632.837	Pertambangan dan pertanian
8	Mahakam Ulu	b.t.	b.t.	b.t.	b.t.
9	Murung Raya	2,456	5,21	18.794.490	Pertanian dan pertambangan
10	Kapuas	2,167	5,61	9.001.239	Pertanian dan pertambangan
11	Gunung Mas	1,459	6,26	7.021.342	Pertanian dan pertambangan
12	Katingan	3,036	6,24	22.609.192	Pertanian dan perdagangan
13	Barito Utara	1,063	5,23	19.286.428	Pertanian dan pertambangan
14	Seruyan	1,020	5,51	7.289.879	Pertanian dan pertambangan
15	Kapuas Hulu	2,131	3,71	5.320.489	Pertanian dan konstruksi
16	Melawi	0,846	4,21	6.050.000	Perdagangan dan pertanian
17	Sintang	3,484	5,40	11.858.360	Pertanian dan perdagangan
	Rata-rata	8,2611	6,091	42.680.172,7	

b.t.: data belum tersedia

Jumlah penduduk miskin di kabupaten dalam kawasan Jantung Kalimantan belum menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Kabupaten yang memperoleh APBD tinggi selama lima tahun terakhir, seperti Kutai Timur dan Kutai Kertanegara, ternyata mempunyai jumlah penduduk miskin yang tertinggi di Jantung Kalimantan (Tabel 3). Selain itu, walau APBD cukup tinggi, kedua kabupaten tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang terendah di Jantung Kalimantan (Tabel 4). Kabupaten lain yang dihuni banyak penduduk miskin adalah Kapuas, Kapuas Hulu, Melawi dan Sintang (Tabel 7).

## 7. MASYARAKAT

Hampir seluruh masyarakat lokal di Jantung Kalimantan berasal dari Suku Dayak. Kelompok etnis yang lain adalah Malayu, Tionghoa dan etnis Jawa yang bermigrasi ke kawasan Jantung Kalimantan sejak awal tahun 1960an. Untuk Suku Dayak, setidaknya terdapat tujuh kelompok di kawasan Jantung Kalimantan: Kayan, Kenyah, Iban, Penan atau Punan, Lundayeh atau Lun Bawang, Kelabit, dan Barito-Ngaju. Kelompok Suku Dayak ini memiliki bahasa, kebudayaan, kearifan tradisional, dan penyebaran geografis yang berbeda.

Dayak Barito-Ngaju secara umum bermukim di bagian tengah Kalimantan dan mereka dikenal memiliki banyak upacara spiritual yang khas. Dayak Barito-Ngaju biasanya menyelenggarakan upacara pemakaman kedua, beberapa bulan atau beberapa tahun setelah upacara pemakaman pertama. Dayak Penan atau Punan, yang tinggal di Kalimantan Timur, dikenal sebagai masyarakat yang berpindah-pindah (nomaden) dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap satwa buru dan sumberdaya hutan lain untuk kehidupan subsisten mereka. Sagu merupakan makanan sehari-hari mereka. Masyarakat Dayak Iban yang kebanyakan bermukim di Kalimantan Barat dikenal memiliki kebiasaan berladang, bertani secara gilir-balik, serta *bejalai* (bermigrasi ke wilayah lain untuk memperbaiki taraf hidup). Dayak Kenyah dan Kayan yang menghuni Kalimantan Timur terkenal karena kemahiran mereka dalam mengukir kayu, membuat aksesori, serta menari dan bermain musik. Dayak Lundayeh yang bermukim di Kalimantan Timur dikenal sangat ahli dalam pertanian sawah tradisional<sup>11</sup>.

## **8. KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN)**

Sejak bulan Maret 2008, melalui Peraturan Pemerintah No. 26/2008<sup>12</sup> kawasan Jantung Kalimantan telah dikukuhkan sebagai salah satu dari 40 Kawasan Strategis Nasional (KSN) di Indonesia. KSN didefinisikan sebagai wilayah yang diprioritaskan untuk perencanaan tata guna lahan mengingat kepentingannya bagi kedaulatan negara, pertahanan negara, dan pembangunan ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, atau bagi penetapan warisan dunia. Dengan ditunjuknya Jantung Kalimantan sebagai KSN, maka pemerintah akan memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang lebih tinggi untuk mengembangkan kawasan tersebut menjadi kawasan yang makmur. Di pihak lain, masyarakat di kawasan tersebut dapat memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan dana investasi pemerintah, serta turut serta dalam mengembangkan kawasan.

---

<sup>11</sup> The Human Heart of Borneo. WWF Global; [www.panda.org](http://www.panda.org).

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.



Sodik Asmoro

### III. PEMANGKU-KEPENTINGAN, PERAN DAN HAK BICARA

#### 1. IDENTIFIKASI PEMANGKU-KEPENTINGAN

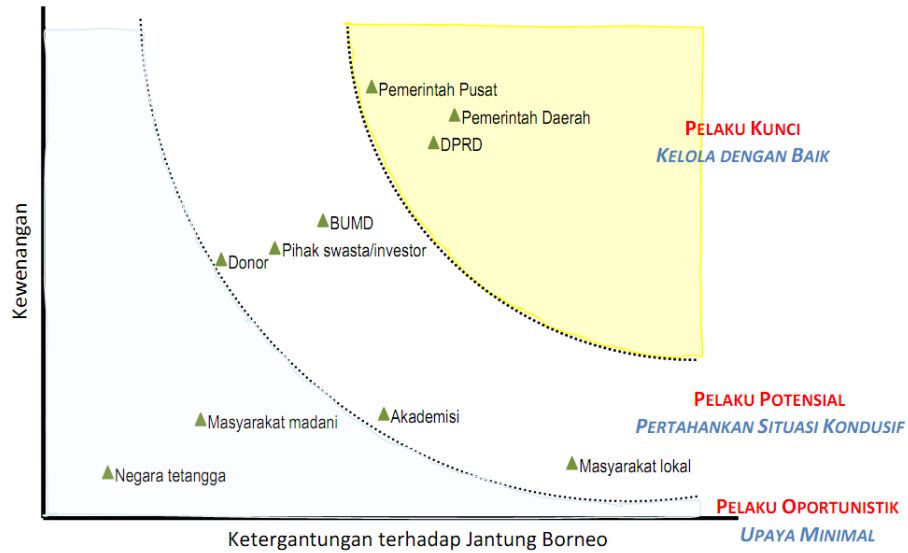
Saat ini terdapat 10 pemangku-kepentingan (*stakeholders*) yang dapat diidentifikasi di kawasan Jantung Kalimantan. Para pemangku-kepentingan ini memiliki minat untuk turut serta dalam mengelola sumberdaya alam dan isu terkait lainnya di kawasan Jantung Kalimantan, baik secara langsung mau pun tidak langsung. Beberapa pemangku-kepentingan memiliki ketergantungan yang erat terhadap sumberdaya di kawasan tersebut, misalnya masyarakat lokal yang tinggal di kawasan tersebut, atau perusahaan skala kecil atau perusahaan lokal yang mengandalkan sumberdaya setempat, atau investor dan pihak swasta yang memiliki ijin konsesi di kawasan. Pemangku-kepentingan lain mungkin tidak terlalu tergantung kepada kawasan tersebut, namun memiliki pengaruh dan hak bersuara untuk mempengaruhi pemangku-kepentingan lain, dan bahkan dapat pula merubah kondisi sumberdaya alam secara dramatis. Contohnya adalah pemerintah (baik pusat mau pun lokal), tokoh politik, serta investor dan potensial investor (Tabel 5).

Untuk menunjukkan hubungan antara kewenangan setiap pemangku-kepentingan dan ketergantungan masing-masing terhadap sumberdaya alam di kawasan Jantung Kalimantan, pada Gambar 3 disajikan posisi masing-masing pemangku-kepentingan. Gambar ini dibuat berdasarkan skor (nilai) yang tertera pada Lampiran 6.

Tabel 5. Daftar pemangku-kepentingan dan peran masing-masing.

No	Pemangku-Kepentingan	Peran and Fungsi	Catatan
1	Pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan adanya kehendak politik (<i>political will</i>) dan memberikan arahan kebijakan di Jantung Kalimantan</li> <li>• Menjabarkan dan merumuskan kebijakan</li> <li>• Memberikan dukungan untuk pembangunan regional</li> <li>• Mengawal pembangunan regional, termasuk monitoring dan evaluasi</li> </ul>	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, BAPPENAS, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertambangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Luar Negeri, termasuk unit teknis masing-masing sektor yang melakukan kegiatan di Kawasan Jantung Kalimantan
2	Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menterjemahkan kebijakan dan arahan nasional ke dalam konteks lokal (Jantung Kalimantan)</li> <li>• Mengintegrasikan dan mensinergikan program berbasis sektor ke dalam pembangunan pada tingkat provinsi dan kabupaten</li> <li>• Menyediakan dana utama, dana penamping, dan dukungan lain yang terkait pembangunan di kawasan Jantung Kalimantan</li> </ul>	Pemerintah tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa
3	DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan berbagai peraturan pada tingkat provinsi dan kabupaten untuk mendukung pembangunan di Jantung Kalimantan</li> <li>• Mengontrol dan mengevaluasi pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten yang termasuk dalam kawasan Jantung Kalimantan</li> <li>• Menyampaikan suara masyarakat lokal yang mewakili provinsi dan kabupaten di Jantung Kalimantan</li> <li>• Mendukung dan menyetujui pendanaan dan inisiatif untuk pembangunan Jantung Kalimantan</li> </ul>	DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten
4	BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan investasi untuk mengembangkan komoditas lokal</li> <li>• Menentukan harga komoditas penting</li> <li>• Memfasilitasi rantai pemasaran untuk komoditas lokal</li> <li>• Membuka lapangan pekerjaan</li> <li>• Mempromisikan <i>best practice</i> pemanfaatan sumberdaya alam yang lestari</li> </ul>	BUMN, BUMD yang melakukan kegiatan di Kawasan Jantung Kalimantan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal</li> </ul>	
5	Pihak swasta/investor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan investasi dalam mengembangkan komoditas yang komersial dan sangat diperlukan</li> <li>• Membuka lapangan pekerjaan</li> <li>• Mempromosikan <i>best practice</i> pemanfaatan sumberdaya alam yang lestari</li> <li>• Memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal</li> </ul>	Perusahaan swasta, investor swasta yang potensial, bisnis dan perdagangan pada semua tingkatan (perusahaan multi-nasional, perusahaan nasional dan lokal)
6	Masyarakat lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan <i>shareholder</i> dari sumberdaya alam di kawasan tersebut</li> <li>• Menyuarakan hak dan kewajiban masyarakat lokal</li> <li>• Turut serta memastikan pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan</li> </ul>	Termasuk masyarakat lokal dan para pendatang yang telah lama bermukim di lokasi tersebut
7	Akademisi dan ilmuwan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan sumberdaya manusia dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia</li> <li>• Menyediakan informasi yang diperlukan serta metodologi yang tepat dalam mengelola sumberdaya alam</li> <li>• Mempromosikan tata cara ilmiah dalam mengelola sumberdaya alam</li> <li>• Memberikan saran dan arahan untuk melakukan kegiatan konservasi dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan</li> </ul>	Dosen perguruan tinggi, mahasiswa dan peneliti pada semua tingkatan (lokal, nasional dan internasional) yang bekerja dan berminat dengan ekosistem, sumberdaya alam, dan isu sosial-ekonomi
8	Masyarakat madani (LSM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turut serta dalam melakukan konservasi dan mengelola sumberdaya alam</li> <li>• Turut serta menyuarakan pentingnya mengelola sumberdaya secara berkelanjutan</li> </ul>	LSM lokal, nasional dan internasional yang berminat dan bekerja di Jantung Kalimantan
9	Donor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan dukungan pendanaan untuk membangun Jantung Kalimantan</li> <li>• Menjembatani program dan kegiatan dengan pihak lain yang relevan</li> <li>• Menyebarkanluaskan hasil pembangunan kepada pihak lain</li> </ul>	Donor dan Lembaga yang berpotensi sebagai donor, termasuk filantropi dan pihak swasta yang tertarik dengan konsep dan isu di Jantung Kalimantan
10	Negara tetangga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitra Jantung Kalimantan</li> </ul>	Negara Bagian Serawak dan Sabah (Malaysia), dan Brunei Darussalam



Gambar 3. Pemetaan pemangku-kepentingan, berdasarkan analisa antara kewenangan dan ketergantungan setiap pemangku-kepentingan terhadap kawasan Jantung Kalimantan.

## 2. ISU PENTING

Sumberdaya dalam jumlah yang memadai merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam membuat Rencana Strategis dan Aksi Nasional Jantung Kalimantan. Namun demikian, dalam masing-masing misi terdapat pula beberapa isu yang perlu dipahami secara seksama dan dimasukkan dalam Rencana Strategis (Tabel 6). Isu tersebut sesungguhnya sangat bervariasi untuk setiap misi, namun dengan memahami masing-masing isu diharapkan bahwa rencana yang akan dibuat akan mencapai misi yang telah dirumuskan.

Untuk mempermudah isu yang rumit dan mengurangi jumlah isu, maka daftar isu dirangkum dalam *cross-cutting* isu (isu lintas sektor). Selain itu, agar isu penting tidak terlewatkan (yaitu tidak termasuk dalam *cross-cutting* isu, namun perlu ditangani di kawasan tersebut), selanjutnya dibuat kriteria untuk menilai apakah isu tersebut sesungguhnya cukup penting untuk dipilih sebagai isu utama (Tabel 7).

Tabel 6. Isu yang teridentifikasi di kawasan Jantung Kalimantan.

Misi	Isu	
1. Kelestarian sumberdaya	2. Eksploitasi sumberdaya alam 3. Kegiatan pertanian <sup>13</sup> 4. Kebakaran hutan 5. Pendanaan 6. Kehendak politik dan kebijakan <sup>14</sup> 7. Infrastruktur <sup>15</sup>	8. Konektivitas <sup>16</sup> 9. Sumberdaya manusia 10. Tataguna lahan dan rencana spasial <sup>17</sup> 11. Kualitas ekosistem <sup>18</sup> 12. Kesejahteraan <sup>19</sup> 13. Energi berkelanjutan
2. Efektivitas pengelolaan kawasan lindung	1. Sumberdaya manusia 2. Pendanaan 3. Infrastruktur 4. Konektivitas 5. Kehendak politik dan kebijakan 6. Kualitas ekosistem	7. Keanekaragaman hayati <sup>20</sup> 8. Penegakan hukum 9. Eksploitasi sumberdaya alam 10. Kesejahteraan 11. Hak dan kepemilikan sumberdaya 12. Kerjasama perbatasan
3. Kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan	1. Kehendak politik dan kebijakan 2. Pendanaan 3. Kesejahteraan 4. Penegakan hukum 5. Eksploitasi sumberdaya alam 6. Kegiatan pertanian 7. Tataguna lahan dan rencana spasial	8. Sumberdaya manusia 9. Perdagangan dan bisnis 10. Konektivitas 11. Infrastruktur 12. Kerjasama perbatasan 13. Energi berkelanjutan
4. Pengembangan ekowisata	1. Kehendak politik dan kebijakan 2. Pendanaan 3. Sumberdaya manusia 4. Kesejahteraan 5. Keanekaragaman hayati 6. Promosi wisata/ekowisata	7. Daerah tujuan wisata 8. Konektivitas 9. Infrastruktur 10. Kerjasama perbatasan 11. Kebudayaan dan kearifan tradisional
5. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	1. Sumberdaya manusia 2. Kehendak politik dan kebijakan 3. Infrastruktur 4. Pendanaan	5. Kerjasama perbatasan 6. Konektivitas 7. Kesejahteraan

Tabel 7. Kriteria untuk memilih isu penting di kawasan Jantung Kalimantan.

Kriteria Memasukkan Isu Tertentu Menjadi Isu Penting	Catatan
Merupakan isu <i>cross-cutting</i>	Lihat Tabel 8 untuk isu <i>cross-cutting</i>
Terjadi dan ditangani di beberapa wilayah (provinsi dan kabupaten)	
Disebutkan dalam <i>Strategic Plan of Action</i> yang disepakati oleh ketiga negara pada tahun 2007	

Dengan menggunakan kriteria tersebut, maka diperoleh 21 isu yang perlu ditangani secara seksama (Tabel 8). Isu ini merupakan isu penting yang perlu ditindaklanjuti dan dikomunikasikan kepada para pemangku-kepentingan.

<sup>13</sup> Pertanian secara umum, termasuk hortikultura, kehutanan, perikanan dan peternakan.

<sup>14</sup> Kehendak politik (*political will*) pemerintah pusat/provinsi dan kabupaten.

<sup>15</sup> Infrastruktur dapat berupa fisik (jalan raya, jalan kereta api, fasilitas pendidikan, telekomunikasi) atau non fisik seperti sistem.

<sup>16</sup> Konektivitas secara fisik dan sistem.

<sup>17</sup> Tataguna lahan termasuk kepemilikan lahan (tenurial) dan alokasi lahan untuk kepentingan pembangunan.

<sup>18</sup> Khususnya ekosistem daratan dan akuatik yang terkena dampak kegiatan pertambangan, serta habitat satwaliar yang terfragmentasi akibat konversi lahan.

<sup>19</sup> Kesejahteraan masyarakat di dalam kawasan Jantung Kalimantan.

<sup>20</sup> Termasuk konservasi satwaliar dan pemanfaatan yang lestari.

Tabel 8. Isu penting yang perlu ditangani di kawasan Jantung Kalimantan.

No	Isu <i>Cross-Cutting</i>	No	Isu Penting Tambahan
1	Kegiatan pertanian	15	Kebakaran hutan
2	Keanekaragaman hayati	16	Hak dan kepemilikan sumberdaya
3	Konektivitas	17	Perdagangan dan bisnis
4	Penegakan hukum	18	Promosi wisata/ekowisata
5	Eksplorasi sumberdaya alam	19	Daerah tujuan wisata
6	Pendanaan	20	Kebudayaan dan kearifan tradisional
7	Sumberdaya manusia	21	Pertumbuhan populasi
8	Infrastruktur		
9	Tataguna lahan dan perencanaan spasial		
10	Kehendak politik dan kebijakan		
11	Kesejahteraan masyarakat		
12	Kualitas ekosistem		
13	Kerjasama perbatasan		
14	Energi berkelanjutan		

### 3. PENDEKATAN MANAJEMEN

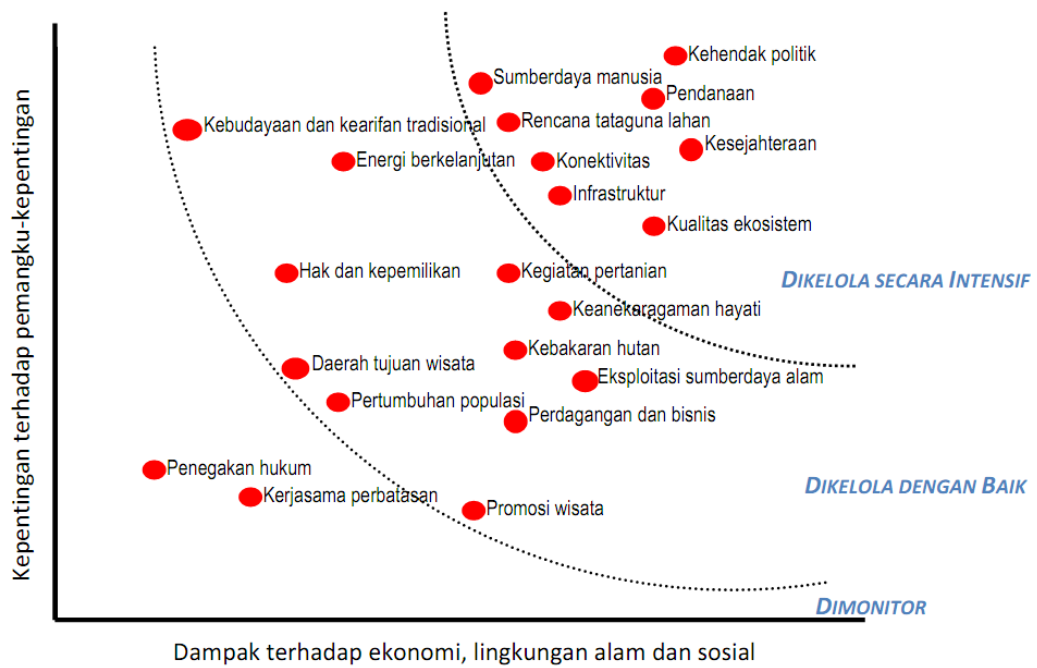
Untuk mengetahui isu mana yang penting dan perlu ditangani secara baik dan intensif, peran para pemangku-kepentingan dipetakan berdasarkan kepentingan masing-masing dan potensi dampak terhadap ekonomi, lingkungan alam dan sosial. Berdasarkan posisi masing-masing pada pemetaan tersebut, maka diperoleh tiga pendekatan manajemen, yaitu dikelola secara intensif, dikelola dengan baik, dan dimonitor.

Pengelolaan intensif didefinisikan sebagai pengelolaan yang menuju pada kepastian arah positif guna meningkatkan/memajukan isu yang pada akhirnya akan membawa pemangku-kepentingan untuk mencapai satu tujuan bersama, misalnya menciptakan kehendak politik dan kebijakan yang lebih baik, atau membuat agar para pemangku-kepentingan lebih mencurahkan perhatian kepada kawasan Jantung Kalimantan. Pengelolaan yang baik didefinisikan sebagai pengelolaan yang mengikuti *best practices* yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan (Gambar 4, and Lampiran 7). Sementara itu, monitor didefinisikan sebagai pengelolaan untuk memastikan bahwa isu telah sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisa, diketahui bahwa terdapat 8 isu penting yang perlu dikelola secara intensif, yaitu kehendak politik, pendanaan, sumberdaya manusia, rencana tataguna lahan, kesejahteraan, konektivitas, infrastruktur, and kualitas ekosistems. Kelompok isu ini benar-benar memerlukan perhatian yang tinggi agar spirit inisiatif Jantung Borneo senantiasa membara dan mengundang minat, serta didukung oleh semua pemangku-kepentingan. Jika isu ini tidak dapat ditangani, maka akan mempengaruhi seluruh program Jantung Kalimantan.

Isu yang perlu dikelola dengan baik adalah energi berkelanjutan, kegiatan pertanian, keanekaragaman hayati, eksploitasi sumberdaya alam, kebakaran hutan, perdagangan dan bisnis, promosi wisata, daerah tujuan wisata, hak dan kepemilikan, kebudayaan dan kearifan tradisional, serta pertumbuhan populasi. Isu ini perlu dikelola dengan baik untuk memastikan terwujudnya kelestarian sumberdaya alam dan kelestarian ekonomi. Jika isu ini kurang mendapat perhatian, maka akan mengakibatkan keruntuhan lingkungan, sosial dan ekonomi di Jantung Kalimantan.

Isu lain yang tersisa, yakni penegakan hukum dan kerjasama perbatasan, disarankan untuk dimonitor guna memastikan bahwa kedua isu ini berada pada jalur yang benar, serta tidak akan mempengaruhi isu yang berada di kedua kelompok yang lain, dalam jangka waktu pendek dan panjang.



Gambar 4. Pemetaan isu, dianalisa berdasarkan kepentingan para pemangku-kepentingan dan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan alam dan sosial di kawasan Jantung Kalimantan.



## IV. PROGRAM

Program strategis untuk Jantung Kalimantan pada dasarnya dirancang sesuai dengan misi yang telah disepakati oleh tiga negara dan dijabarkan dalam dokumen *Strategic Plan of Actions*. Namun demikian, setiap negara sesungguhnya memiliki kedaulatan dan keleluasaan untuk mengembangkan rencana asing-masing, sepanjang rencana tersebut selaras dengan misi yang telah disepakati. Untuk kasus Indonesia dan wilayah Jantung Kalimantan, seperti telah disampaikan pada bagian terdahulu, kawasan Jantung Kalimantan baru-baru ini telah dikukuhkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). Oleh karenanya, program dan misi yang akan dirancang harus pula disesuaikan sedemikian rupa sehingga memenuhi tujuan KSN namun tetap mengacu pada tema dan misi Jantung Kalimantan.

Misi Jantung Kalimantan dan KSN selanjutnya diintegrasikan dan sinergikan menjadi lima tema/misi Jantung Kalimantan, kemudian diterjemahkan dalam lima program prioritas (Program 2 hingga 6), dengan tambahan program persiapan (Program 1) sebagai dasar yang kuat untuk mengimplementasikan kelima program lainnya. Dengan demikian, jumlah program menjadi enam. Kelima program utama dikembangkan untuk mengatasi isu terkini dan isu potensial yang terjadi di kawasan Jantung Kalimantan untuk jangka menengah dan panjang, serta disesuaikan dengan tujuan Jantung Kalimantan dan KSN. Berikut ini disampaikan program Jantung Kalimantan yang akan dicapai dalam waktu 5 tahun ke depan.

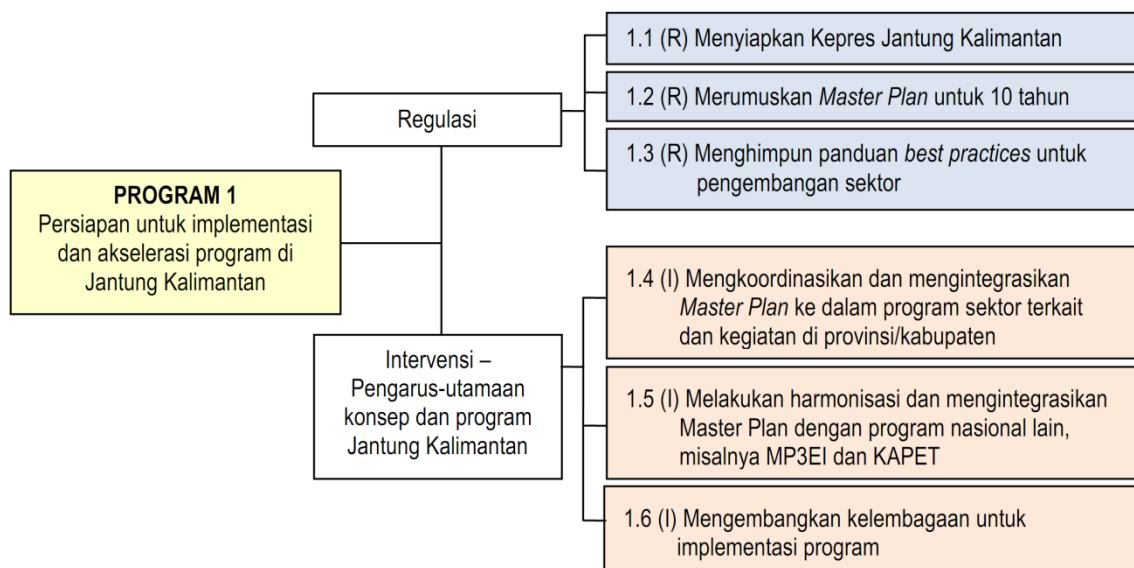
### PROGRAM 1: Persiapan untuk implementasi dan akselerasi program di Jantung Kalimantan

**Tujuan:** untuk memberikan dasar yang kuat bagi program dan kegiatan yang akan dikembangkan di Jantung Kalimantan

**Arahan kebijakan:**

- Keputusan Presiden no. 3/2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
- Dokumen *Strategic Plan of Action of Heart of Borneo* yang telah disepakati oleh tiga negara pada tahun 2007

Kerangka kerja Program 1 disajikan pada Gambar 5 dan kegiatan program diuraikan dalam Tabel 9.



Gambar 5. Kerangka kerja Program 1: Persiapan untuk implementasi dan akselerasi program di Jantung Kalimantan (R: Regulasi/Peraturan, I: Intervensi).

Tabel 9. Matriks kegiatan untuk Program 1: Persiapan untuk implementasi dan akselerasi program di Jantung Kalimantan (R: Regulasi/Peraturan, I: Intervensi).

No	Kegiatan Utama	Luaran yang Diharapkan	Instansi Utama	Harapan Selesai
1.1(R)	Menyiapkan Keputusan Presiden tentang Kawasan Jantung Kalimantan	Keputusan Presiden tentang Kawasan Jantung Kalimantan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Desember 2015
1.2(R)	Merumuskan Master Plan Kawasan Jantung Kalimantan untuk 10 tahun	Master Plan Jantung Kalimantan 2015-2025	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Desember 2015
1.3(R)	Menghimpun atau mengembangkan panduan <i>best practice</i> untuk pengembangan sektor (kehutanan, pertanian, pertambangan, infrastruktur dan pembangunan kota di kawasan Jantung Kalimantan)	Panduan <i>best practice</i> untuk mengembangkan sektor kehutanan, pertanian, pertambangan, infrastruktur dan pembangunan kota di Jantung Kalimantan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Desember 2015
1.4(I)	Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan Master Plan Jantung Kalimantan ke dalam program sektor terkait dan kegiatan di provinsi/kabupaten	Persetujuan antara sektor dan provinsi/kabupaten tentang pembangunan di Jantung Kalimantan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Desember 2016
1.5(I)	Melakukan harmonisasi dan mengintegrasikan Master Plan Jantung Kalimantan dengan program nasional, misalnya MP3EI dan KAPET	Kesesuaian pembangunan di Jantung Kalimantan dan program nasional lain	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Desember 2016
1.6 (I)	Mengembangkan kelembagaan untuk implementasi program di Jantung Kalimantan	Terbentuk lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengawasan implementasi program dan kegiatan di Jantung Kalimantan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Juli 2015

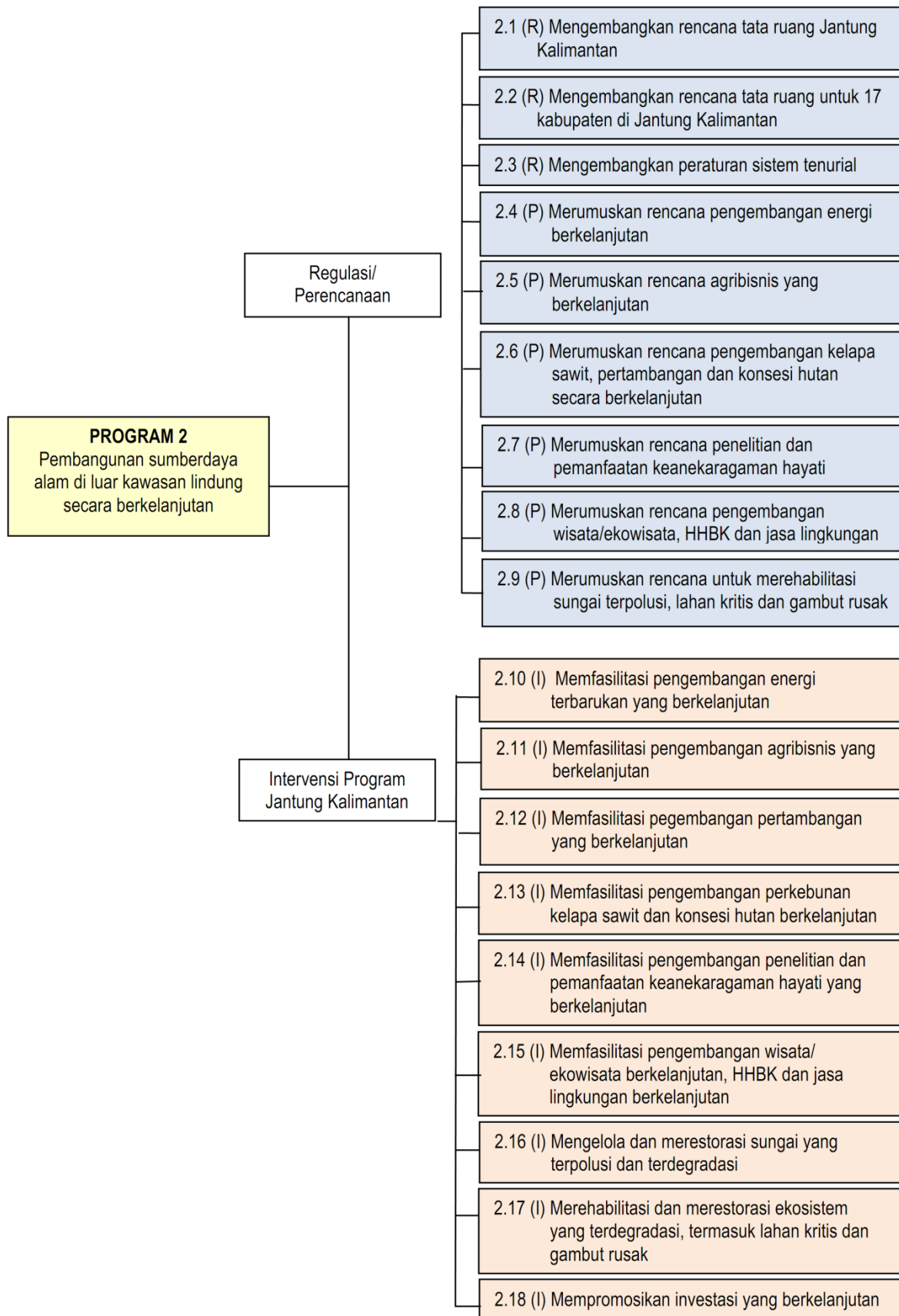
**PROGRAM 2: Pembangunan sumberdaya alam di luar kawasan lindung secara berkelanjutan di Jantung Kalimantan**

**Tujuan:** mengelola sumberdaya alam di luar kawasan lindung secara berkelanjutan di kawasan Jantung Kalimantan yang berada di wilayah Indonesia

**Arahan kebijakan:**

- Peraturan Pemerintah no. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Keputusan Presiden no. 3/2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
- Peraturan Pemerintah yang relevan dengan pembangunan berbasis lahan

Kerangka kerja Program 2 disajikan pada Gambar 6 dan kegiatan program diuraikan dalam Tabel 10.



Gambar 6. Kerangka kerja Program 2: Pembangunan sumberdaya alam di luar kawasan lindung secara berkelanjutan di Jantung Kalimantan (R: Regulasi, P: Perencanaan, I: Intervensi).

Tabel 10. Matriks kegiatan untuk Program 2: Pembangunan sumberdaya alam di luar kawasan lindung secara berkelanjutan di Jantung Kalimantan (R: Regulasi, P: Perencanaan, I: Intervensi).

No	Kegiatan Utama	Luaran yang Diharapkan	Lembaga Utama	Harapan Selesai
2.1(R)	Mengembangkan rencana tata ruang Jantung Kalimantan	Kesepakatan terhadap rencana tata ruang Jantung Kalimantan	Kementerian Pekerjaan Umum	Desember 2015
2.2(R)	Mengembangkan rencana tata ruang untuk 17 kabupaten di Jantung Kalimantan	Rencana tata ruang 17 kabupaten di Jantung Kalimantan	Provinsi and kabupaten yang terkait	Desember 2015
2.3(R)	Mengembangkan peraturan sistem tenurial di Jantung Kalimantan sesuai dengan kebijakan nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesepakatan terhadap tenurial sistem di Jantung Kalimantan area</li> </ul>	Kementerian yang terkait	Desember 2015
2.4(P)	Merumuskan rencana konsep pengembangan energi berkelanjutan di Jantung Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana tentang energy terbarukan di Jantung Kalimantan</li> <li>• Standar and prosedur untuk investasi energi terbarukan dan berkelanjutan di Jantung Kalimantan</li> </ul>	Kementerian Pertambangan	Desember 2016
2.5(P)	Merumuskan rencana konsep pengembangan agribisnis berkelanjutan di Jantung Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana pengembangan agribisnis di Jantung Kalimantan</li> <li>• Standar and prosedur untuk investasi agribisnis berkelanjutan di Jantung Kalimantan</li> </ul>	Kementerian yang terkait	Agustus 2017
2.6(P)	Merumuskan atau memperkuat rencana konsep untuk mengembangkan pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan konsesi hutan secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana pengembangan atau penguatan pembangunan berbasis lahan</li> <li>• Standar dan prosedur investasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan konsesi hutan secara berkelanjutan di Jantung Kalimantan</li> </ul>	Kementerian yang terkait	Agustus 2017
2.7(P)	Merumuskan rencana konsep penelitian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana penelitian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati</li> <li>• Standar and procedure untuk melakukan investasi berkelanjutan terkait bisnis keanekaragaman hayati</li> </ul>	Kementerian Riset dan Teknologi	Agustus 2016
2.8(P)	Merumuskan rencana konsep untuk wisata/ekowisata, HHBK dan jasa lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana wisata/ ekowisata, HHBK dan jasa lingkungan di luar kawasan lindung di Jantung Kalimantan</li> <li>• Standar and prosedur untuk investasi wisata/ekowisata, HHBK dan jasa lingkungan di luar kawasan lindung secara berkelanjutan di Jantung</li> </ul>	Kementerian yang terkait	Agustus 2015

		Kalimantan		
2.9(l)	Merumuskan rencana untuk rehabilitasi sungai terpolusi, lahan kritis dan gambut rusak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana untuk merehabilitasi sungai terpolusi, lahan kritis dan gambut rusak</li> </ul>	Kementerian yang terkait	Agustus 2015
2.10(l)	Memfasilitasi pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan di Jantung Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi untuk energi terbarukan yang berkelanjutan dapat ditingkatkan</li> <li>Jumlah dan jenis investasi untuk energi terbarukan meningkat</li> </ul>	Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM)	Diteruskan ke periode selanjutnya
2.11(l)	Memfasilitasi pengembangan agribisnis yang berkelanjutan di Jantung Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi untuk agribisnis yang berkelanjutan dapat ditingkatkan</li> <li>Jumlah dan jenis investasi untuk agribisnis berkelanjutan meningkat</li> </ul>	Kementerian yang terkait	Desember 2017
2.12(l)	Memfasilitasi pengembangan pertambangan yang berkelanjutan di Jantung Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi untuk pertambangan yang berkelanjutan dapat ditingkatkan</li> <li>Jumlah dan jenis investasi untuk pertambangan berkelanjutan meningkat</li> </ul>	Kementerian ESDM	Desember 2017
2.13(l)	Memfasilitasi pengembangan perkebunan kelapa sawit dan konsesi hutan yang berkelanjutan di Jantung Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi untuk perkebunan kelapa sawit dan konsesi hutan yang berkelanjutan dapat ditingkatkan</li> <li>Jumlah perusahaan kelapa sawit yang menjadi anggota ISPO dan RSPO meningkat</li> <li>Jumlah perusahaan yang sudah melaksanakan SFM meningkat</li> </ul>	Kementerian yang terkait	Desember 2017
2.14(l)	Memfasilitasi pengembangan penelitian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan di Jantung Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi untuk penelitian dan bisnis keanekaragaman hayati berkelanjutan dapat ditingkatkan</li> <li>Jumlah penelitian dan investasi untuk bisnis keanekaragaman hayati meningkat</li> </ul>	Kementerian Riset dan Teknologi	Desember 2017
2.15(l)	Memfasilitasi pengembangan wisata/ekowisata berkelanjutan, HHBK dan jasa lingkungan yang berkelanjutan di luar kawasan lindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi untuk jasa lingkungan yang berkelanjutan dapat ditingkatkan</li> <li>Jumlah dan jenis investasi untuk jasa lingkungan berkelanjutan meningkat</li> </ul>	Kementerian Kehutanan	Diteruskan ke periode selanjutnya
2.16(l)	Mengelola dan merestorasi sungai yang terpolusi dan terdegradasi di Jantung Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sungai yang berkualitas tinggi dan berfungsi dengan baik di Jantung Kalimantan meningkat</li> </ul>	Kementerian Pekerjaan Umum	Desember 2019
2.17(l)	Merehabilitasi dan merestorasi ekosistem yang terdegradasi,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sungai yang berkualitas tinggi dan berfungsi</li> </ul>	Kementerian Pekerjaan Umum	Desember 2019

	termasuk lahan kritis dan lahan gambut yang rusak	dengan baik di Jantung Kalimantan meningkat <ul style="list-style-type: none"> <li>Fungsi ekosistem darat dan DAS meningkat</li> </ul>		
2.18(I)	Mempromosikan investasi yang berkelanjutan di Jantung Kalimantan	Dokumen promosi Jantung Kalimantan yang senantiasa diperbaharui	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Diteruskan ke periode selanjutnya

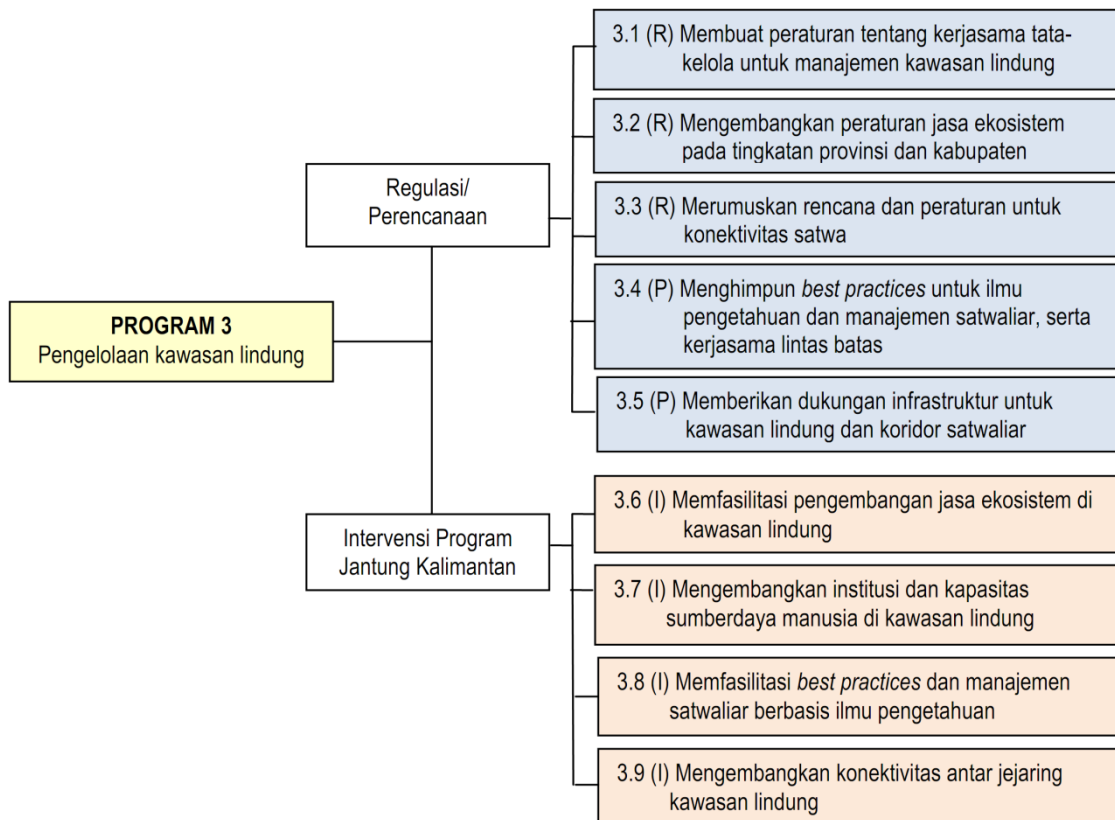
### PROGRAM 3: Pengelolaan kawasan lindung

**Tujuan:** meningkatkan efektivitas kawasan lindung dan meningkatkan partisipasi pemangku-kepentingan dalam mengelola kawasan lindung di kawasan Jantung Kalimantan, agar keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dapat dilestarikan dengan baik

**Arahan kebijakan:**

- Peraturan Pemerintah no. 28/2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- Peraturan Pemerintah no. 7/1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- Keputusan Presiden no. 3/2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
- Peraturan yang terkait dengan pengelolaan kawasan lindung dan konservasi keanekaragaman hayati

Kerangka kerja Program 3 disajikan pada Gambar 7 dan kegiatan program diuraikan dalam Tabel 11.



Gambar 7. Kerangka kerja Program 3: Pengelolaan kawasan lindung (R: Regulasi,P: Perencanaan, I: Intervensi).

Tabel 11. Matriks kegiatan Program 3: Pengelolaan kawasan lindung (R: Regulasi, P: Perencanaan, I: Intervensi).

No	Kegiatan Utama	Luaran yang Diharapkan	Lembaga Utama	Harapan Selesai
3.1(R)	Membuat peraturan tentang kerjasama tata-kelola untuk manajemen kawasan lindung	Peraturan tentang pengelolaan kolaboratif manajemen kawasan lindung di Jantung Kalimantan	Kementerian Kehutanan	Desember 2017
3.2(R)	Mengembangkan jasa ekosistem pada tingkatan provinsi dan kabupaten	Peraturan tentang jasa Ekosistem pada tingkatan provinsi dan kabupaten	Provinsi dan kabupaten yang terkait	Desember 2017
3.3(R)	Merumuskan rencana dan peraturan untuk konektivitas satwaliar	Rencana dan peraturan tentang koridor satwaliar antar kawasan lindung	Kementerian Kehutanan	Desember 2017
3.4(P)	Menghimpun <i>best practices</i> untuk ilmu pengetahuan dan manajemen satwaliar, serta kerjasama lintas-batas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Panduan <i>best practices</i> untuk manajemen satwaliar</li> <li>• Panduan penelitian satwaliar di Jantung Kalimantan</li> <li>• Kerjasama lintas-batas untuk manajemen dan penelitian satwaliar</li> </ul>	Kementerian Kehutanan	Desember 2017
3.5(P)	Memberikan dukungan infrastruktur untuk kawasan lindung dan koridor satwaliar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan infrastruktur untuk manajemen kawasan lindung</li> <li>• Koridor satwaliar antar kawasan lindung</li> </ul>	Kementerian Kehutanan	Diteruskan ke periode selanjutnya
3.6(I)	Memfasilitasi dan mempromosikan jasa ekosistem di kawasan lindung, termasuk air, karbon dan gas rumah kaca di Jantung Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standar dan prosedur untuk investasi jasa lingkungan yang berkelanjutan di Jantung Kalimantan</li> <li>• Kesadaran akan jasa lingkungan meningkat</li> <li>• Investasi untuk jasa lingkungan meningkat</li> </ul>	Kementerian Kehutanan	Desember 2019
3.7(I)	Mengembangkan institusi dan kapasitas sumberdaya manusia di kawasan lindung di Jantung Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Institusi dengan sumberdaya manusia yang kuat untuk menudukung kawasan lindung</li> <li>• Dukungan yang tinggi dari masyarakat terhadap kawasan lindung</li> </ul>	Kementerian terkait	Desember 2017
3.8(I)	Memfasilitasi <i>best practices</i> dan manajemen satwaliar berbasis ilmu pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spesies satwaliar yang dikelola dengan baik di kawasan lindung</li> <li>• Populasi satwa terancam punah stabil dan bahkan dapat ditingkatkan</li> </ul>	Kementerian Kehutanan	Desember 2019
3.9(I)	Mengembangkan konektivitas antar jejaring kawasan lindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koridor satwaliar yang baik antar jejaring kawasan lindung di Jantung Kalimantan</li> <li>• Terjadi pertukaran sumberdaya genetik antar kawasan lindung</li> </ul>	Kementerian Kehutanan	Diteruskan ke periode selanjutnya

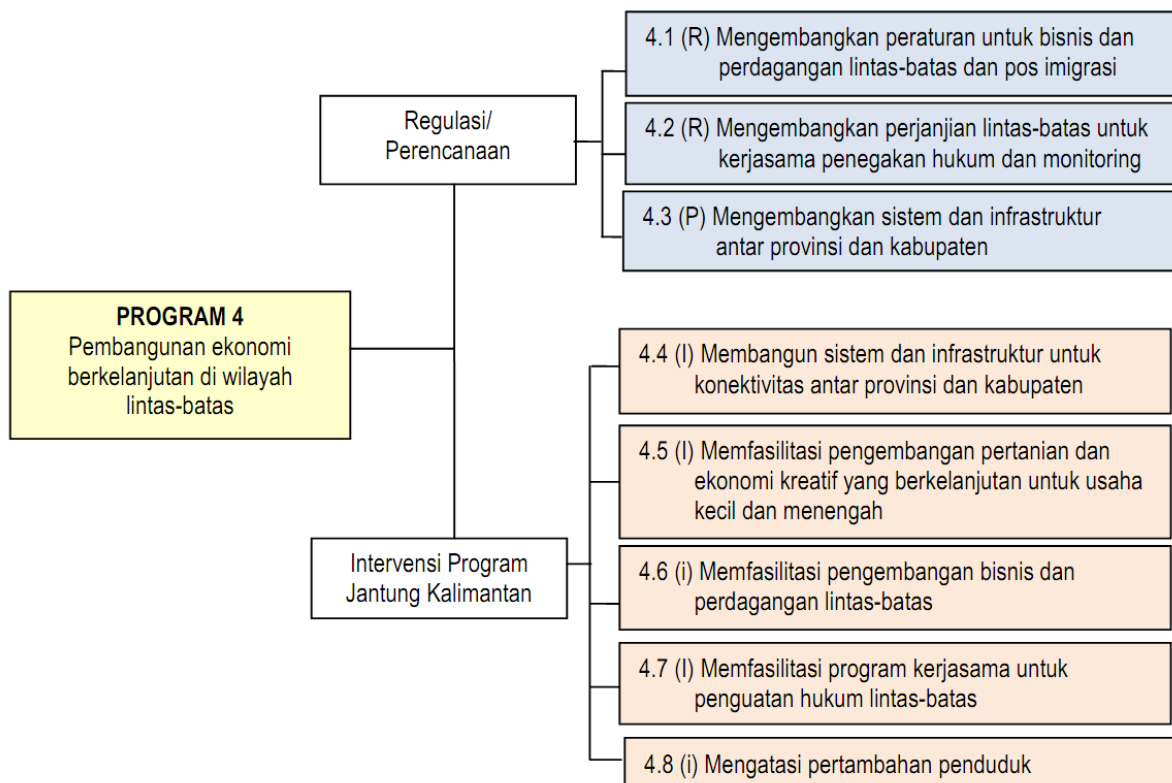
#### PROGRAM 4: Pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah lintas-batas

**Tujuan:** kesejahteraan masyarakat di wilayah lintas-batas berdasarkan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan

**Arahan kebijakan:**

- UU No. 41/1999 tentang Kehutanan
- UU No. 18/2004 tentang Perkebunan
- UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- UU No. 32/2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- UU No. 45/2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Keputusan Presiden No. 3/2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
- Peraturan yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya di Indonesia

Kerangka kerja Program 4 disajikan pada Gambar 8 dan kegiatan program diuraikan dalam Tabel 12.



Gambar 8. Kerangka kerja Program 4: Pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah lintas-batas (R: Regulasi, P: Perencanaan, I: Intervensi).

Tabel 12. Matriks kegiatan Program 4: Pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah lintas-batas (R: Regulasi, P: Perencanaan, I: Intervensi).

No	Kegiatan Utama	Luaran yang Diharapkan	Lembaga Utama	Harapan Selesai
4.1(R)	Mengembangkan peraturan untuk bisnis dan perdagangan lintas-batas, serta pos pengawasan imigrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyetujui regulasi tentang bisnis dan perdagangan lintas-batas</li> <li>Kesepakatan terkait imigrasi</li> </ul>	Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri	Desember 2017
4.2(R)	Mengembangkan perjanjian lintas-batas untuk kerjasama penegakan hukum dan monitoring	MoU tentang kerjasama penegakan hukum serta monitoring perdagangan dan bisnis bersama	Kepolisian RI	Desember 2017
4.3(P)	Mengembangkan sistem dan infrastruktur antar provinsi dan kabupaten di Jantung Kalimantan	Dokumen perencanaan tentang sistem dan interkoneksi antar provinsi dan kabupaten di Jantung Kalimantan	BAPPENAS	Desember 2017
4.4(I)	Membangun sistem dan infrastruktur untuk konektivitas antar provinsi dan kabupaten di Jantung Kalimantan	Sistem dan infrastruktur yang saling terhubung antar provinsi dan kabupaten di Jantung Kalimantan	Kementerian Pekerjaan Umum	Diteruskan ke periode selanjutnya
4.5(I)	Memfasilitasi pengembangan pertanian dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan untuk usaha kecil dan menengah	Jumlah usaha kecil dan menengah di bidang pertanian dan ekonomi kreatif meningkat	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Diteruskan ke periode selanjutnya
4.6(I)	Memfasilitasi pengembangan kerjasama bisnis dan perdagangan lintas-batas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bisnis dan perdagangan lintas-batas meningkat</li> <li>Kontribusi ekonomi terhadap GDP kabupaten di Jantung Kalimantan meningkat</li> </ul>	Kementerian of Perdagangan	Diteruskan ke periode selanjutnya
4.7(I)	Memfasilitasi program kerjasama untuk penegakan hukum lintas-batas	Bisnis dan perdagangan lintas-batas dalam suasana yang aman dan terkelola baik	Kepolisian RI	Diteruskan ke periode selanjutnya
4.8(I)	Mengatasi penambahan penduduk	Populasi penduduk menurun hingga sama dengan pertumbuhan tingkat nasional	Kementerian Kesehatan	Diteruskan ke periode selanjutnya

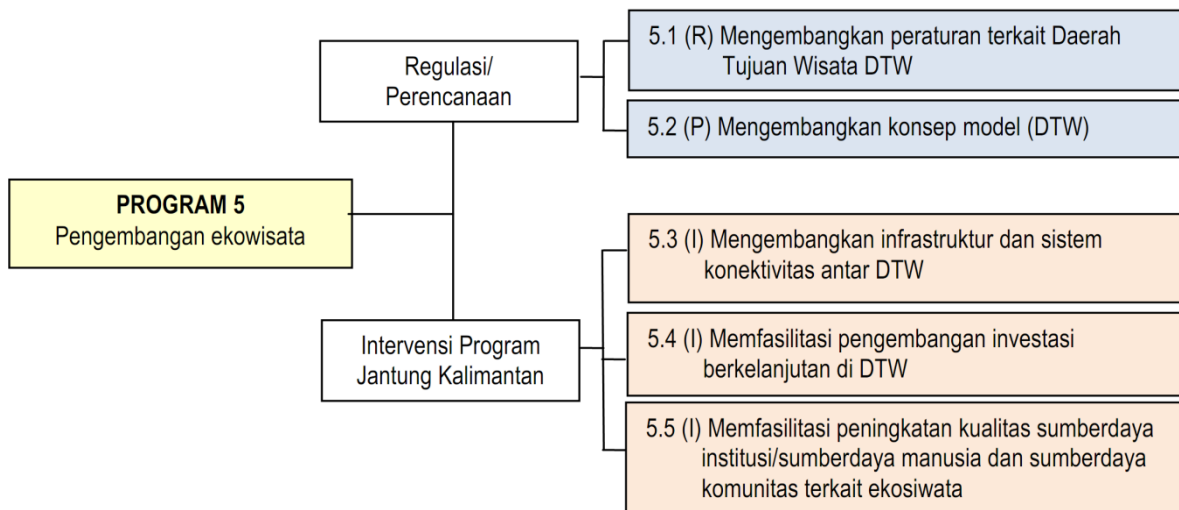
## PROGRAM 5: Pengembangan ekowisata

**Tujuan:** mengidentifikasi dan mempromosikan pengembangan ekowisata berkelanjutan di kawasan Jantung Kalimantan

**Arahan kebijakan:**

- UU No. 10/2009 tentang Kepariwisata
- Peraturan Pemerintah No. 36/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
- Keputusan Presiden No. 3/2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
- Peraturan lain yang relevan dan masih berlaku terkait pariwisata dan ekowisata

Kerangka kerja Program 5 disajikan pada Gambar 9 dan kegiatan program diuraikan dalam Tabel 13.



Gambar 9. Kerangka kerja Program 5: Pengembangan ekowisata (R: Regulasi, P: Perencanaan, I: Intervensi).

Tabel 13. Matriks kegiatan Program 5: Pengembangan ekowisata (R: Regulasi, P: Perencanaan, I: Intervensi).

No	Kegiatan Utama	Luaran yang Diharapkan	Lembaga Utama	Harapan Selesai
5.1(R)	Mengembangkan peraturan terkait Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Jantung Kalimantan	Peraturan provinsi dan kabupaten untuk DTW di Jantung Kalimantan, misalnya standar dan prosedur investasi di DTW	Provinsi and kabupaten yang terkait	Desember 2017
5.2(P)	Mengembangkan konsep model DTW di Jantung Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rencana yang disepakati untuk DTW di Jantung Kalimantan</li> <li>Standar dan kriteria DTW di Jantung Kalimantan</li> </ul>	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Desember 2017
5.3(I)	Mengembangkan infrastruktur dan sistem konektivitas antar DTW	Infrastruktur and konektivitas sistem yang diperlukan oleh TDA Jantung Kalimantan dapat dibangun	Kementerian Pekerjaan Umum	Desember 2019
5.4(I)	Memfasilitasi pengembangan investasi berkelanjutan di DTW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah DTW yang menarik dan terkelola dengan baik meningkat</li> <li>Jumlah wisatawan yang berkunjung ke DTW meningkat</li> <li>Kontribusi sektor pariwisata terhadap GDP kabupaten di Jantung Kalimantan meningkat</li> </ul>	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Diteruskan ke periode selanjutnya
5.5(I)	Memfasilitasi peningkatan kapasitas insitusi/kelompok masyarakat/sumberdaya manusia dalam bidang ekowisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kemampuan institusi dalam menangani ekowisata di provinsi dan kabupaten di Jantung Kalimantan meningkat</li> <li>Sumberdaya manusia yang mumpuni dan tersertifikasi untuk mendukung pariwisata di Jantung Kalimantan mencukupi</li> <li>Jumlah usahawan berbasis masyarakat dalam bidang ekowisata meningkat</li> </ul>	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Diteruskan ke periode selanjutnya

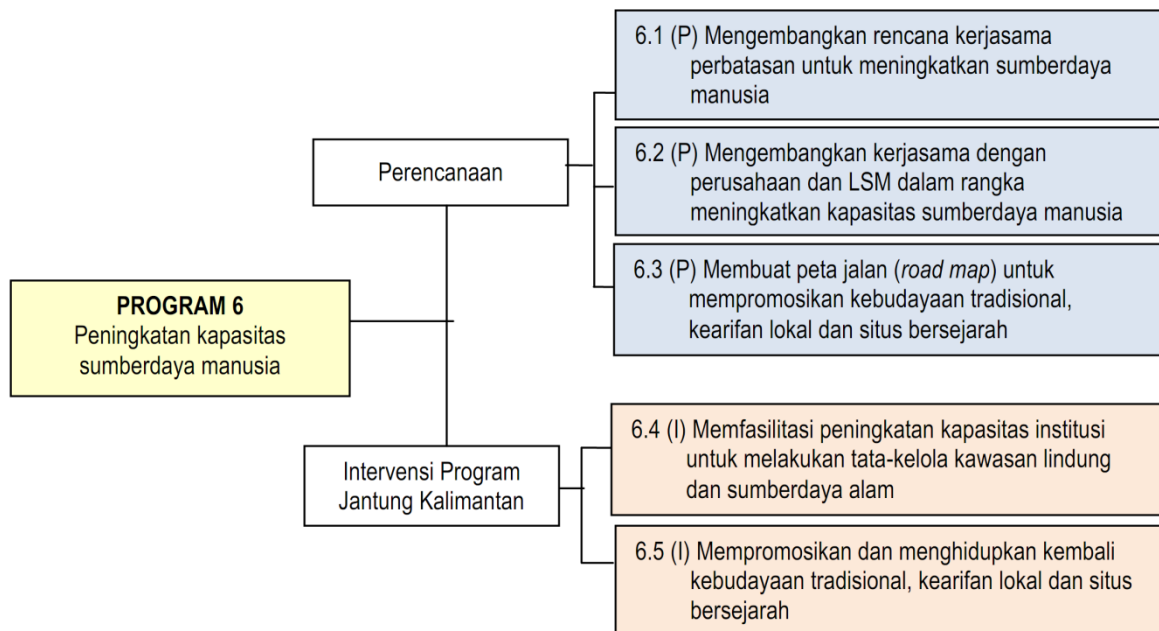
## PROGRAM 6: Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia

**Tujuan:** memperkuat sumberdaya manusia lokal agar dapat melakukan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan dan pengelolaan kawasan lindung, serta pengembangan pariwisata

**Arahan kebijakan:**

- UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Pemerintah No. 32/2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan
- Keputusan Presiden no. 3/2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
- Peraturan lain yang relevan dan masih berlaku terkait pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia

Kerangka kerja Program 6 disajikan pada Gambar 10 dan kegiatan program diuraikan dalam Tabel 14.



Gambar 10. Kerangka kerja Program 6: Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (P: Perencanaan, I: Intervensi).

Tabel 14. Matriks kegiatan Program 6: Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (P: Perencanaan, I: Intervensi).

No	Kegiatan Utama	Luaran yang Diharapkan	Lembaga Utama	Harapan Selesai
6.1(P)	Mengembangkan konsep kerjasama perbatasan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	MoU tentang kerjasama perbatasan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	Kementerian Dalam Negeri	Desember 2017
6.2(P)	Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia	MoU tentang peningkatan kapasitas sumberdaya manusia antara provinsi/kabupaten di Jantung Kalimantan dan perusahaan	Kementerian yang terkait	Desember 2017
6.3(P)	Membuat peta jalam ( <i>road map</i> ) untuk mempromosikan kebudayaan tradisional, kearifan lokal dan situs bersejarah	Rencana untuk mempromosikan kebudayaan tradisional, kearifan lokal dan situs bersejarah	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Desember 2017
6.4(I)	Memfasilitasi peningkatan kapasitas insitusi untuk melakukan tata-kelola kawasan lindung dan sumberdaya alam	Kapasitas institusi yang kuat untuk melaksanakan tata-kelola kawasan lindung dan sumberdaya alam	Kementerian yang terkait	Diteruskan ke periode selanjutnya
6.5(I)	Mempromosikan dan menghidupkan kembali kebudayaan tradisional, kearifan lokal dan situs bersejarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebudayaan tradisional dan kearifan lokal berkembang di Jantung Kalimantan</li> <li>• Situs bersejarah di Jantung Kalimantan terkelola dan menjadi DTW yang marak dikunjungi</li> <li>• Dukungan yang tinggi dari provinsi, kabupaten dan masyarakat lokal terhadap pengetahuan dan kebudayaan tradisional</li> </ul>	Kementerian yang terkait	Diteruskan ke periode selanjutnya



WWF/Alain Compost

## V. PENDEKATAN STRATEGIS

### 1. DAMPAK DAN POTENSI DAMPAK TERHADAP PROGRAM

Program skala besar yang akan dilaksanakan di suatu areal tanpa persiapan yang cukup dapat menyebabkan dampak yang besar, baik dampak positif atau pun dampak negatif. Skala dampak ini terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan dapat bervariasi dari satu program ke program lainnya, tergantung kesiapan dan kehati-hatian dalam melaksanakan program tersebut.

Untuk menghindari permasalahan yang tidak terduga di kemudian hari, diperlukan pemahaman mengenai seluk-beluk program sebelum diimplementasikan, sehingga potensi resiko dan dampak negatif dapat dikurangi dan bahkan dihindari. Pada Tabel 5 disampaikan potensi dampak dari masing-masing program terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan di kawasan Jantung Kalimantan.

### 2. BATAS RENTANG PENGELOLAAN

Setelah dilakukan identifikasi potensi dampak terhadap program di Jantung Kalimantan, selanjutnya perlu dilakukan kajian terhadap pengelolaan dampak, yakni dengan cara mengoptimalkan dampak positif dan meminimumkan dampak negatif. Agar pengelolaan dampak dapat terlaksana dengan baik, dan pada saat bersamaan dapat mempercepat pelaksanaan program, maka disarankan untuk mengenali kompleksitas masing-masing program dan benar-benar memahami dampaknya.

Setelah suatu dampak atau isu dapat dipahami dengan baik, tahap berikutnya adalah menentukan apakah dampak tersebut berada dalam batas rentang pengelolaan (*span of control*). Jika dampak berada dalam batas rentang pengelolaan, maka pengelolaan dampaknya akan lebih mudah dan relatif tidak rumit. Sebaliknya, jika dampak atau isu berada di luar batas rentang pengelolaan, maka diperlukan koordinasi antar pemangku-kepentingan. Selanjutnya, mengingat bahwa kata 'dampak' dapat memiliki makna positif dan negatif, maka untuk menghilangkan kesan negatif, kata 'dampak' akan diganti dengan kata 'aspek' yang memiliki kesan netral atau positif (Tabel 16).

### 3. PENDEKATAN PELAKSANAAN PROGRAM

Kesuksesan dan keberhasilan program yang telah dirancang akan sangat tergantung pada pendekatan pelaksanaan program. Untuk kawasan Jantung Kalimantan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menjadi pemicu spirit dan ibaratnya akan bertindak selaku *conductor of the orchestra*. Tentu saja Kementerian ini tidak dapat bekerja sendiri dan semua pemangku-kepentingan perlu mendukung program dan bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Salah satu kunci utam untuk mencapai keberhasilan ini adalah melakukan koordinasi dan integrasi program yang relevan dalam kerangka kerja Jantung Kalimantan (Gambar 10).

Tabel 15. Potensi dampak yang diakibatkan oleh program Jantung Kalimantan.

Program	Kegiatan Utama	Ekonomi		Sosial		Lingkungan	
		Dampak Positif	Dampak Negatif	Dampak Positif	Dampak Negatif	Dampak Positif	Dampak Negatif
1: Persiapan untuk implementasi dan akselerasi program di Jantung Kalimantan	1.1(R) Menyiapkan Keputusan Presiden tentang Kawasan Jantung Kalimantan	Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung		Kebijakan publik yang jelas		Mengurangi resiko lingkungan	
	1.2(R) Merumuskan <i>Master Plan</i> Kawasan Jantung Kalimantan untuk 10 tahun	Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung		Kebijakan publik yang jelas		Mengurangi resiko lingkungan	
	1.3(R) Menghimpun atau mengembangkan panduan <i>best practice</i> untuk pengembangan sektor (kehutanan, pertanian, pertambangan, infrastruktur dan pembangunan kota di Kawasan Jantung Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung</li> <li>Peningkatan ketersediaan pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan biaya</li> <li>Pasokan terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Padiatapa terlaksana</li> <li>Menghilangkan atau mengurangiAvoided or less conflict with masyarakat lokal</li> </ul>		Mengurangi resiko lingkungan	
	1.4(l) Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan <i>Master Plan</i> Jantung Kalimantan ke dalam program sektor terkait dan kegiatan di provinsi/kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempercepat program Jantung Kalimantan</li> <li>Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan komunikasi</li> </ul>		Mengurangi resiko lingkungan	
	1.5(l) Melakukan harmonisasi dan mengintegrasikan Master Plan Jantung Kalimantan dengan program nasional, misalnya MP3EI dan KAPET	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan komunikasi</li> <li>Kebijakan publik yang jelas</li> </ul>		Mengurangi resiko lingkungan	
	1.6(l) Mengembangkan kelembagaan untuk implementasi program di Jantung Kalimantan						
2.. Pembangunan sumberdaya alam di luar kawasan lindung secara berkelanjutan	2.1(R) Mengembangkan rencana tata ruang Jantung Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepastian investasi</li> <li>Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan publik yang jelas</li> <li>Menghindari atau mengurangi konflik</li> </ul>		Mengurangi resiko lingkungan	
	2.2(R) Mengembangkan rencana tata ruang untuk 17 kabupaten di Jantung Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepastian investasi dan arahnya</li> <li>Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan publik yang jelas</li> <li>Menghilangkan atau mengurangi konflik atas lahan</li> </ul>		Mengurangi resiko lingkungan	
	2.3(R) Mengembangkan peraturan sistem tenurial di Jantung Kalimantan sesuai dengan kebijakan nasional						
	2.4(P) Merumuskan rencana konsep pengembangan energi berkelanjutan di Jantung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepastian investasi dan arah pengembangan energi berkelanjutan</li> <li>Peningkatan ekonomi secara</li> </ul>		Kebijakan publik yang jelas dalam bidang energi terbarukan			Meningkatkan resiko lingkungan

2. Pembangunan sumberdaya alam di luar kawasan lindung secara berkelanjutan	Kalimantan	langsung atau tak langsung						
	2.5(P) Merumuskan rencana konsep pengembangan agribisnis berkelanjutan di Jantung Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepastian investasi dan arah pengembangan agribisnis berkelanjutan</li> <li>• Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung</li> </ul>			Kebijakan publik yang jelas untuk pengembangan agribisnis		Mengurangi resiko lingkungan	Meningkatkan of resiko lingkungan
	2.6(P) Merumuskan atau memperkuat rencana konsep untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan konsesi hutan secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepastian investasi dan arah pengembangan perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan konsesi hutan secara berkelanjutan</li> <li>• Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung</li> </ul>			Kebijakan publik yang jelas untuk bidang pengembangan perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan konsesi hutan secara berkelanjutan		Mengurangi resiko lingkungan	Meningkatkan resiko lingkungan
	2.7(P) Merumuskan rencana konsep penelitian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepastian investasi dan arah pengembangan penelitian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati</li> <li>• Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung</li> </ul>			Kebijakan publik yang jelas untuk penelitian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati		Mengurangi resiko lingkungan	
	2.8(P) Merumuskan rencana konsep untuk wisata/ekowisata, HHBK dan jasa lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepastian investasi dan arah pengembangan wisata/ekowisata, HHBK dan jasa lingkungan yang berkelanjutan</li> <li>• Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung</li> </ul>			Kebijakan publik yang jelas untuk wisata ekowisata, HHBK dan jasa lingkungan		Mengurangi resiko lingkungan	
	2.9(P) Merumuskan rencana untuk merehabilitasi sungai terpolusi, lahan kritis dan gambut rusak	Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung					Mengurangi resiko lingkungan	
	2.10(I) Memfasilitasi pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan di Jantung Kalimantan	Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan pekerjaan</li> <li>• Pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia</li> <li>• Keterlibatan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskriminasi</li> <li>• Korupsi</li> <li>• Tidak memenuhi kewajiban</li> <li>• Permasalahan tenaga kerja</li> </ul>	Mengurangi resiko lingkungan	
	2.11(I) Memfasilitasi pengembangan agribisnis yang berkelanjutan di Jantung Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung</li> <li>• Ketersediaan pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan cost and energi</li> <li>• Pasokan terbatas</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan pekerjaan</li> <li>• Pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia</li> <li>• Keterlibatan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskriminasi</li> <li>• Korupsi</li> <li>• Tidak memenuhi kewajiban</li> <li>• Permasalahan tenaga kerja</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekosistem, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, limbah dan transportasi</li> </ul>
	2.12(I) Memfasilitasi pengembangan pertambangan yang berkelanjutan di Jantung Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung</li> <li>• Ketersediaan pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan biaya and energi</li> <li>• Pasokan terbatas</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan pekerjaan</li> <li>• Pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia</li> <li>• Keterlibatan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskriminasi</li> <li>• Korupsi</li> <li>• Tidak memenuhi kewajiban</li> <li>• Permasalahan tenaga kerja</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekosistem, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, limbah dan transportasi</li> </ul>

2. Pembangunan sumberdaya alam di luar kawasan lindung secara berkelanjutan	2.13(I) Memfasilitasi pengembangan perkebunan kelapa sawit dan konsesi hutan yang berkelanjutan di Jantung Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung</li> <li>• Ketersediaan pasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan biaya and energi</li> <li>• Pasokan terbatas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan pekerjaan</li> <li>• Pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia</li> <li>• Keterlibatan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskriminasi</li> <li>• Korupsi</li> <li>• Tidak memenuhi kewajiban</li> <li>• Permasalahan tenaga kerja</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekosistem, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, limbah dan transportasi</li> </ul>
	2.14(I) Memfasilitasi pengembangan penelitian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan di Jantung Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung</li> <li>• Ketersediaan pasar</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan pekerjaan</li> <li>• Pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia</li> <li>• Keterlibatan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskriminasi</li> <li>• Korupsi</li> <li>• Tidak memenuhi kewajiban</li> <li>• Permasalahan tenaga kerja</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekosistem, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, limbah dan transportasi</li> </ul>
	2.15(I) Memfasilitasi pengembangan wisata/ekowisata berkelanjutan, HHBK dan jasa lingkungan yang berkelanjutan di luar kawasan lindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung</li> <li>• Ketersediaan pasar</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan pekerjaan</li> <li>• Pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia</li> <li>• Keterlibatan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskriminasi</li> <li>• Korupsi</li> <li>• Tidak memenuhi kewajiban</li> <li>• Permasalahan tenaga kerja</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekosistem, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, limbah dan transportasi</li> </ul>
	2.16(I) Mengelola dan merestorasi sungai yang terpolusi dan terdegradasi di Jantung Kalimantan	Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung	Menambah biaya untuk investasi dan manajemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan pekerjaan</li> <li>• Pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia</li> <li>• Keterlibatan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskriminasi</li> <li>• Korupsi</li> <li>• Tidak memenuhi kewajiban</li> <li>• Permasalahan tenaga kerja</li> </ul>	Meningkatkan kualitas ekosistem	
	2.17(I) Merehabilitasi dan merestorasi ekosistem yang terdegradasi, termasuk lahan kritis dan lahan gambut yang rusak	Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung				Meningkatkan kualitas ekosistem	
	2.18(I) Mempromosikan investasi yang berkelanjutan di Jantung Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung</li> <li>• Ketersediaan pasar</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan pekerjaan</li> <li>• Pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia</li> <li>• Keterlibatan masyarakat</li> </ul>			
3. Pengelolaan kawasan lindung	3.1(R) Membuat peraturan tentang kerjasama tata-kelola untuk manajemen kawasan lindung	Meningkatkan potensi investasi di kawasan lindung		Kebijakan publik yang jelas		Mengurangi resiko lingkungan	
	3.2(R) Mengembangkan peraturan jasa ekosistem pada tingkatan provinsi dan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepastian investasi dan arah pembangunan yang berkelanjutan</li> <li>• Mengembangkan keanekaragaman hayati berbasis penelitian dan pemanfaatan berkelanjutan</li> <li>• Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung</li> </ul>		Kebijakan publik yang jelas		Mengurangi resiko lingkungan	
	3.3(R) Merumuskan rencana dan peraturan untuk konektivitas satwaliar		Investasi di koridor keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan publik yang jelas</li> <li>• Padiatapa terlaksana</li> </ul>	Berpotensi menimbulkan konflik lahan dengan masyarakat lokal	Mengurangi resiko lingkungan	

	3.4(P) Menghimpun <i>best practices</i> untuk ilmu pengetahuan dan manajemen satwaliar, serta kerjasama lintas-batas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arahan untuk pengembangan penelitian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan manajemen satwaliar</li> <li>Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung</li> </ul>		Tidak memenuhi kewajiban peraturan terkait pembangunan berkelanjutan		Mengurangi resiko lingkungan		
	3.5(P) Memberikan dukungan infrastruktur untuk kawasan lindung dan koridor satwaliar							
	3.6(I) Memfasilitasi dan mempromosikan jasa ekosistem di kawasan lindung, termasuk air, karbon dan gas rumah kaca di Jantung Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung</li> <li>Ketersediaan pasar</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Lapangan pekerjaan</li> <li>Pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia</li> <li>Keterlibatan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diskriminasi</li> <li>Korupsi</li> <li>Tidak memenuhi kewajiban</li> <li>Permasalahan tenaga kerja</li> </ul>		Ekosistem, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, limbah dan transportasi	
	3.7(I) Mengembangkan institusi dan kapasitas sumberdaya manusia di kawasan lindung	Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia</li> <li>Kesempatan yang sama</li> <li>Meningkatkan posisi tawar secara kolektif</li> </ul>		Meningkatkan kualitas ekosistem		
	3.8(I) Memfasilitasi <i>best practices</i> dan manajemen satwaliar berbasis ilmu pengetahuan		Investasi pada sistem manajemen keanekaragaman hayati	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia</li> <li>Keterlibatan masyarakat</li> </ul>		Mengurangi resiko lingkungan		
	3.9(I) Mengembangkan konektivitas antar jejaring kawasan lindung							
4. Pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah lintas-batas	4.1(P) Mengembangkan peraturan untuk bisnis dan perdagangan lintas-batas, serta pos pengawasan imigrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepastian investasi dan arah pembangunan yang berkelanjutan</li> <li>Mengembangkan keanekaragaman hayati berbasis penelitian dan pemanfaatan berkelanjutan</li> <li>Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan publik yang jelas</li> <li>Padiatapa terlaksana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan spekulasi lahan</li> </ul>	Mengurangi resiko lingkungan		
	4.2(R) Mengembangkan perjanjian lintas-batas untuk kerjasama penegakan hukum dan monitoring	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kepastian investasi dan arahan kebijakan bisnis lintas-batas</li> <li>Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung</li> </ul>		Kebijakan publik yang jelas			Resiko lingkungan	
	4.3(R) Mengembangkan sistem dan infrastruktur antar provinsi dan kabupaten di Jantung Kalimantan	Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung		Kebijakan publik yang jelas			Mengurangi resiko lingkungan	
	4.4(I) Membangun sistem dan infrastruktur untuk konektivitas antar provinsi dan kabupaten di Jantung Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung</li> <li>Ketersediaan pasar</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan lapangan kerja</li> <li>Kesempatan yang sama</li> <li>Pendidikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindakan kriminal</li> <li>Hak masyarakat lokal</li> <li>Kebudayaan</li> </ul>		Ekosistem, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, limbah dan transportasi	

				<ul style="list-style-type: none"> <li>Keamanan</li> <li>Komunikasi</li> </ul>			
	4.5(l) Memfasilitasi pengembangan pertanian dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan untuk usaha kecil dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung</li> <li>Ketersediaan pasar</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan lapangan kerja</li> <li>Kesempatan yang sama</li> <li>Pendidikan</li> <li>Peningkatan kualitas sumberdaya manusia</li> </ul>			Ekosistem, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, limbah dan transportasi
	4.6(l) Memfasilitasi pengembangan kerjasama bisnis dan perdagangan lintas-batas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung</li> <li>Ketersediaan pasar</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan lapangan kerja</li> <li>Kesempatan yang sama</li> <li>Pendidikan</li> <li>Keamanan</li> <li>Komunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindakan kriminal</li> <li>Hak masyarakat lokal</li> <li>Kebudayaan</li> </ul>		Resiko lingkungan
	4.7(l) Memfasilitasi program kerjasama untuk penegakan hukum lintas-batas	Kepastian investasi		Mengurangi permasalahan sosial		Mengurangi resiko lingkungan	
	4.8(l) Mengatasi penambahan penduduk	Peningkatan ekonomi secara tak langsung		Mengurangi permasalahan sosial		Mengurangi resiko lingkungan	
5. Pengembangan ekowisata	5.1(R) Mengembangkan peraturan terkait Daerah Tujuan Wisata (DTW) di Jantung Kalimantan	Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan publik yang jelas</li> <li>Padiatapa terlaksana</li> </ul>		Mengurangi resiko lingkungan	
	5.2(P) Mengembangkan konsep model DTW di Jantung Kalimantan	Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan publik yang jelas</li> <li>Padiatapa dilaksanakan</li> </ul>		Mengurangi resiko lingkungan	
	5.3(l) Mengembangkan infrastruktur dan sistem konektivitas antar DTW	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung</li> <li>Ketersediaan pasar</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Lapangan pekerjaan</li> <li>Keterlibatan masyarakat</li> <li>Pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan tenaga kerja</li> <li>Korupsi</li> <li>Tidak memenuhi kewajiban</li> </ul>		Ekosistem, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, limbah dan transportasi
	5.4(l) Memfasilitasi pengembangan investasi berkelanjutan di DTW						
	5.5(l) Memfasilitasi peningkatan kapasitas insitusi/kelompok masyarakat/sumberdaya manusia dalam bidang ekowisata	Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung		<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterlibatan masyarakat</li> <li>Pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia</li> <li>Kesempatan yang sama</li> </ul>		Mengurangi resiko lingkungan	
	6.1(P) Mengembangkan rencana kerjasama perbatasan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung		<ul style="list-style-type: none"> <li>Lapangan pekerjaan</li> <li>Keterlibatan masyarakat</li> <li>Pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia</li> <li>Kesempatan yang sama</li> </ul>		Mengurangi resiko lingkungan	

6. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia	6.2(P) Mengembangkan kerjasama dengan perusahaan dalam rangka meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia	Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan pekerjaan</li> <li>• Keterlibatan masyarakat</li> <li>• Pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia</li> <li>• Kesempatan yang sama</li> </ul>		Mengurangi resiko lingkungan	
	6.3(P) Membuat peta jalam ( <i>road map</i> ) untuk mempromosikan kebudayaan tradisional, kearifan lokal dan situs bersejarah	Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan pekerjaan</li> <li>• Keterlibatan masyarakat</li> <li>• Pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia</li> <li>• Kesempatan yang sama</li> </ul>		Mengurangi resiko lingkungan	
	6.4(l) Memfasilitasi peningkatan kapasitas insitisi untuk melakukan tata-kelola kawasan lindung dan sumberdaya alam	Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan pekerjaan</li> <li>• Keterlibatan masyarakat</li> <li>• Pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia</li> <li>• Kesempatan yang sama</li> </ul>		Mengurangi resiko lingkungan	
	6.5(l) Mempromosikan dan menghidupkan kembali kebudayaan tradisional, kearifan lokal dan situs bersejarah	Peningkatan ekonomi secara langsung atau tak langsung		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lapangan pekerjaan</li> <li>• Keterlibatan masyarakat</li> <li>• Pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia</li> <li>• Kesempatan yang sama</li> </ul>		Mengurangi resiko lingkungan	

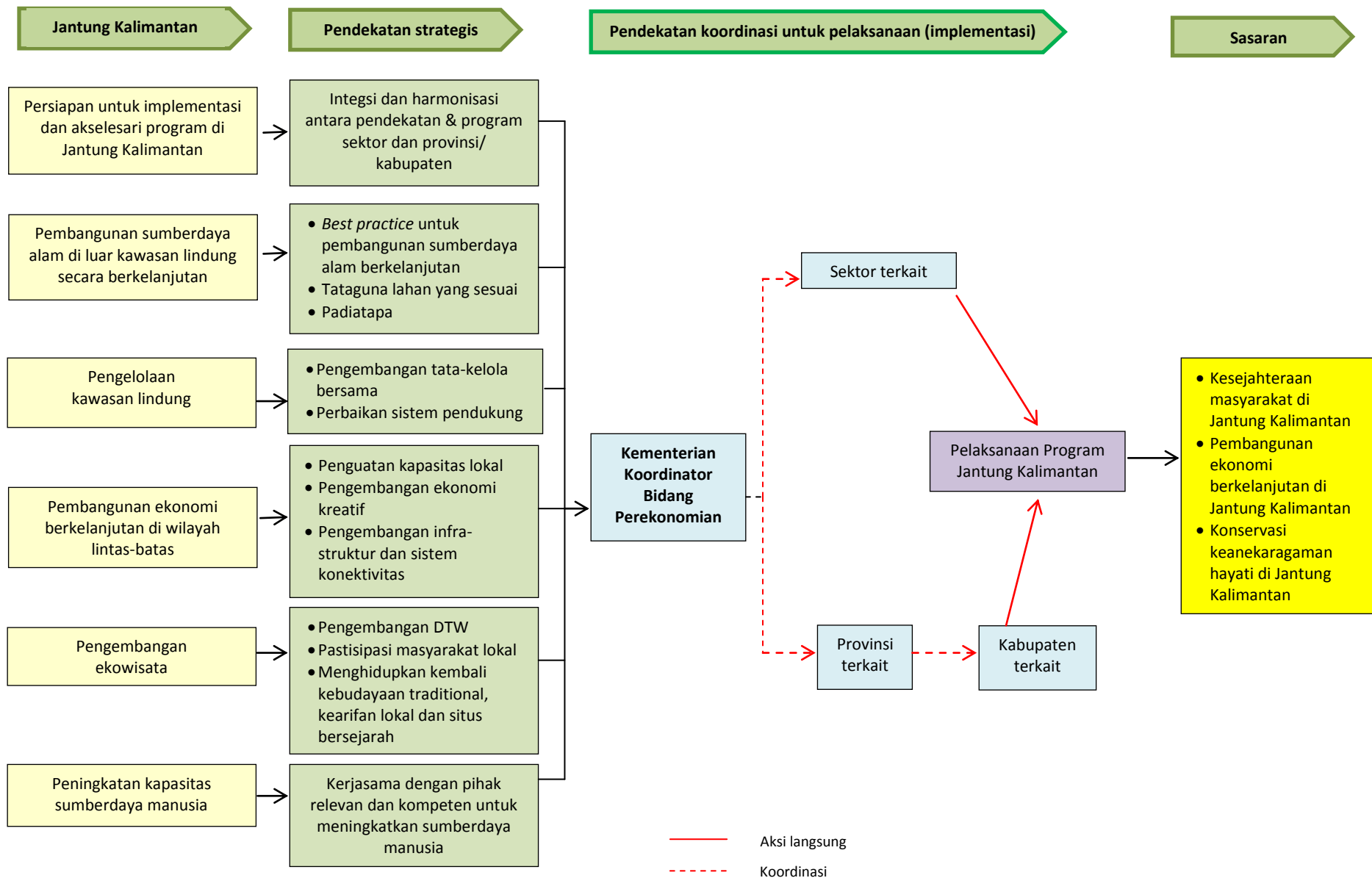
Tabel 16. Batas rentang pengelolaan (*span of control*) oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk program dan kegiatan di Jantung Kalimantan.

No	Aspek	Batas Rentang Pengelolaan	
		Di Dalam	Di Luar
1	Peningkatan ekonomi secara langsung	✓	✓
2	Peningkatan ekonomi secara tidak langsung	✓	✓
3	Kebijakan publik yang jelas	✓	✓
4	Resiko lingkungan		✓
5	Percepatan program program	✓	
6	Pemenuhan kewajiban untuk pembangunan berkelanjutan	✓	✓
7	Peningkatan biaya/investasi		✓
8	Pelaksanaan Padiatapa		✓
9	Pengurangan atau penghilangan konflik	✓	✓
10	Peningkatan komunikasi	✓	
11	Kepastian dan arahan investasi	✓	✓
12	Investasi dan manajemen di koridor keanekaragaman hayati		✓
13	Ketersediaan pasar	✓	✓
14	Keterbatasan pasokan		✓
15	Pekerjaan		✓
16	Pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia		✓
17	Keterlibatan masyarakat lokal		✓
18	Kebijakan yang tak berpihak		✓
19	Korupsi	✓	✓
20	Pemenuhan kewajiban secara umum		✓
21	Air		✓
22	Keanekaragaman hayati		✓
23	Energi		✓
24	Emisi		✓
25	Limbah		✓
26	Transportasi		✓
27	Tindakan kriminal dan spekulasi		✓
28	Kesempatan sama dan peningkatan posisi tawar kolektif		✓
29	Keamanan		✓
30	Permasalahan sosial		✓
31	Hak masyarakat adat		✓
32	Kebudayaan		✓
33	Potensi konflik dengan masyarakat lokal		✓
34	Investasi skala besar		✓

\*dampak

*UCAPAN TERIMA KASIH. Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kamu haturkan kepada nama-nama di bawah ini, yang telah memberikan bantuan yang sangat berharga dalam mempersiapkan dan menyelesaikan dokumen ini:*

1. Dr. Prabianto Mukti Wibowo;
2. Heinrich Terhorst;
3. Wisnu Rusmanto;
4. Elizabeth Wetik;
5. Semua anggota Kelompok Kerja Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo Working Group*);
6. Yayasan WWF Indonesia



Gambar 11. Pendekatan implementasi strategis untuk program di Jantung Kalimantan.



Rodiah

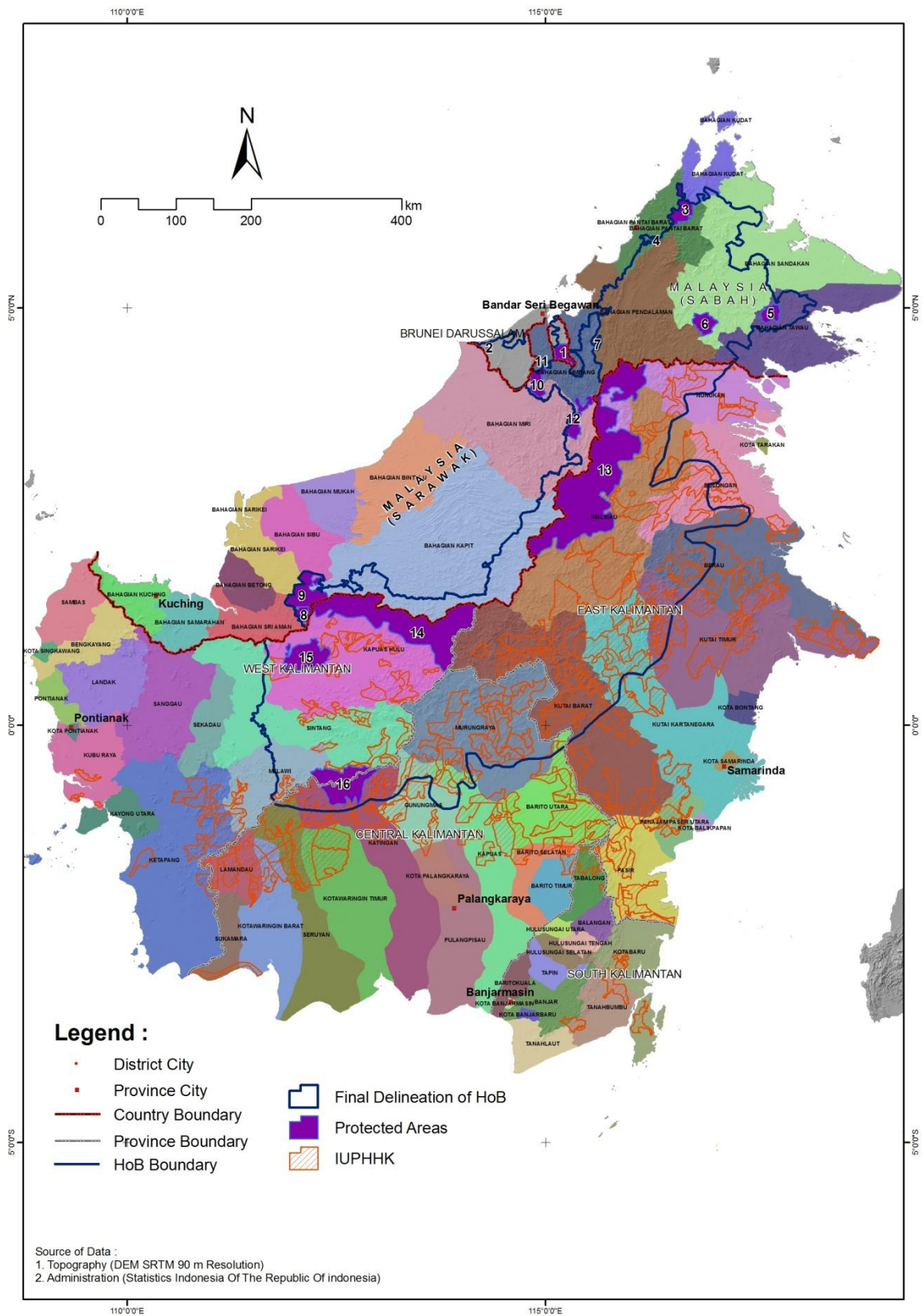
## LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar provinsi, kabupaten dan kecamatan yang berada di dalam kawasan Jantung Kalimantan.

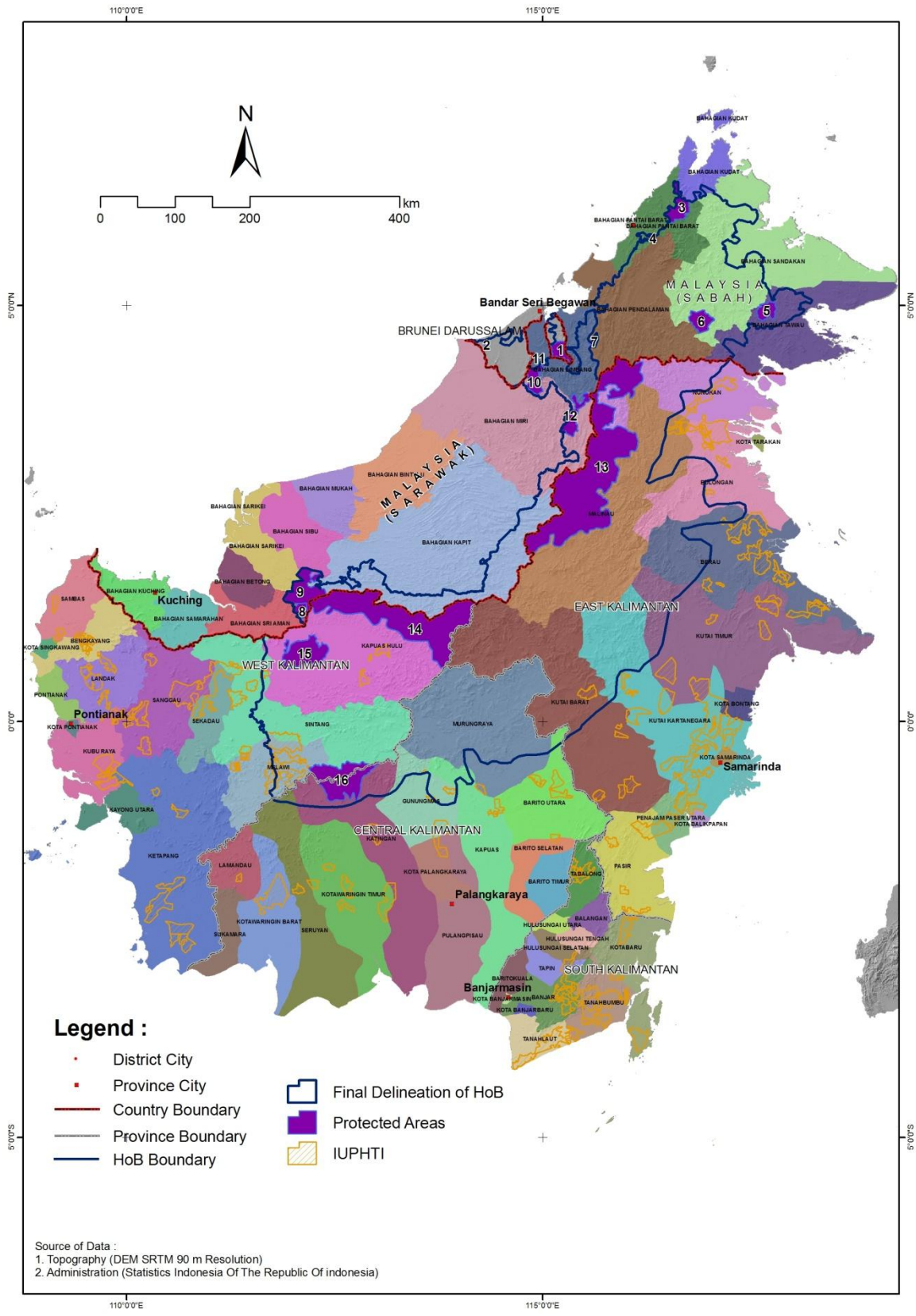
Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	
		Jumlah	Nama
Kalimantan Utara			
	Nunukan	3	Krayan, Lumbis, Nunukan
	Malinau	5	Kayan Hilir, Kayan Hulu, Malinau, Mentarang, Pujungan
	Bulungan	3	Peso, Sekatak, Tanjung Palas
Kalimantan Timur			
	Berau	3	Gunung Tabur, Kelai, Segah
	Kutai Timur	2	Muara Ancalong dan Muara Wahau
	Kutai Kartanegara	2	Kembang Janggut, Tabang
	Kutai Barat	7	Damai, Long Apari, Long Bagun, Long Hubung, Long Iram, Long Pahangai, Melak
	Mahakam Ulu	n.a.	n.a.
Kalimantan Tengah			
	Murung Raya	5	Laung Tuhup, Murung, Permata Intan, Sumber Barito, Tanah Siang
	Kapuas	2	Kapuas Hulu, Kapuas Tengah
	Gunung Mas	5	Kahayan Hulu Utara, Kurun, Munuhing, Rungan, Tewah
	Katingan	3	Katingan Hulu, Marikit, dan Sanaman Mantikei
	Barito Utara	1	Lahei
	Seruyan	1	Seruyan Hulu
Kalimantan Barat			
	Kapuas Hulu	23	Badau, Batang Lupar, Batu Datu, Boyan Tanjung, Bunut Hilir, Bunut Hulu, Embaloh Hilir, Embaloh Hulu, Embau, Empanang, Hulu Gurung, Kalis, Kedamin, Manday, Mentebah, Puring Kencana, Putussibau, Seberuang, Selimbau, Semitau, Silat Hilir, Silat Hulu, Suhaid
	Melawi	5	Belimbing, Ella Hilir, Menukung, Nanga Pinoh, Sayan
	Sintang	12	Ambalau, Binjai Hulu, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Kelam Permai, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, Serawai, Sintang, Sungai Tebelian

Catatan- kabupaten: 17; jumlah kecamatan: 82

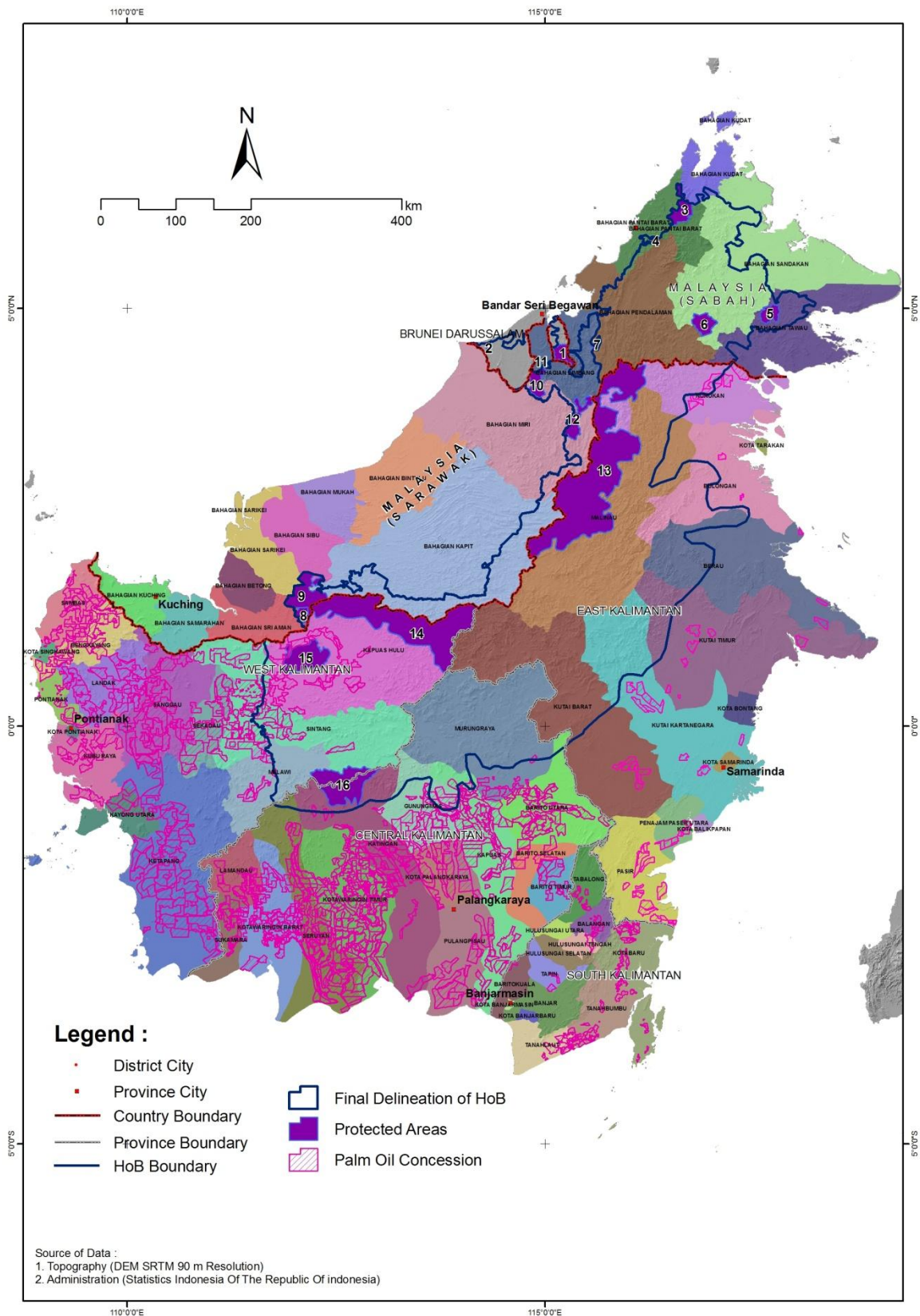
Lampiran 2. Penyebaran konsesi hutan (IUPHHK) di kawasan Jantung Kalimantan.  
 Sumber peta: WWF



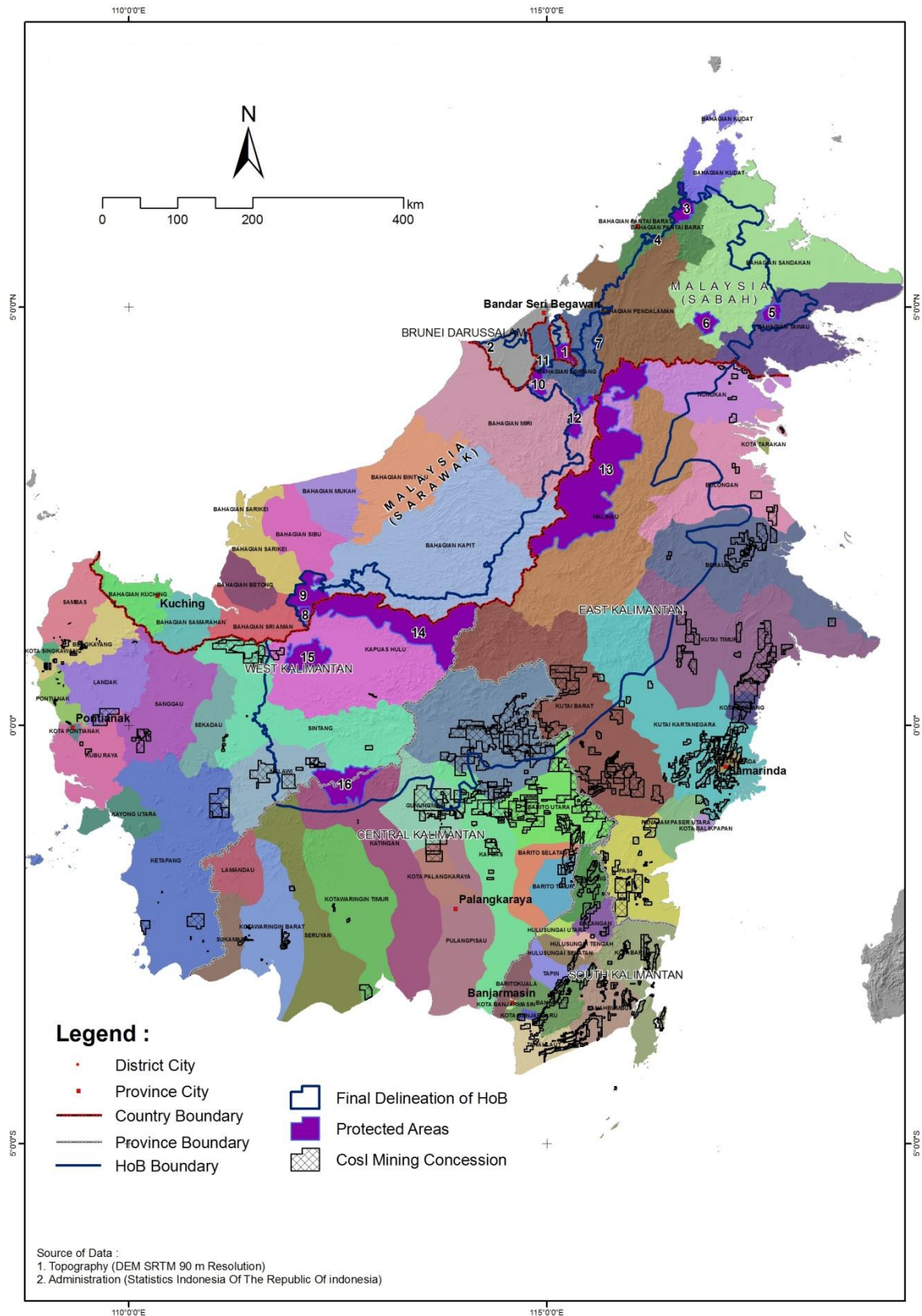
Lampiran 3. Penyebaran Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan Jantung Kalimantan.  
 Sumber peta: WWF



Lampiran 4. Penyebaran perkebunan kelapa sawit di kawasan Jantung Kalimantan.  
 Sumber peta: WWF



Lampiran 5. Penyebaran konsesi pertambangan batubara di kawasan Jantung Kalimantan.  
 Sumber peta: WWF



Lampiran 6. Nilai untuk pemetaan pemangku-kepentingan berdasarkan kewenangan dan ketergantungan.

No	Pemangku-Kepentingan	Kewenangan	Ketergantungan
1	Pemerintah pusat	3	2
2	Pemerintah daerah	3	3
3	DPRD	3	3
4	BUMD	2	2
5	Pihak swasta/investor	2	2
6	Masyarakat lokal	1	3
7	Akademisi dan ilmuwan	1	2
8	Masyarakat madani	1	1
9	Donor	2	1
10	Negara tetangga	1	1

Catatan - tinggi 3; sedang 2; rendah 1

Lampiran 6. Nilai untuk pemetaan isu berdasarkan kepentingan terhadap pemangku-kepentingan dan dampak terhadap ekonomi, lingkungan alam dan sosial.

No	Isu yang Teridentifikasi	Kepentingan terhadap Pemangku-Kepentingan	Dampak terhadap Ekonomi, Lingkungan Alam dan Sosial
1	Kegiatan pertanian	2	3
2	Keanekaragaman hayati	2	3
3	Konektivitas	3	3
4	Penegakan hukum	1	1
5	Eksplorasi sumberdaya alam	2	3
6	Pendanaan	3	3
7	Sumberdaya manusia	3	3
8	Infrastruktur	3	3
9	Tataguna lahan dan perencanaan spasial	3	3
10	Kehendak politik dan kebijakan	3	3
11	Kesejahteraan masyarakat	3	3
12	Kualitas ekosistem	3	3
13	Kerjasama perbatasan	1	1
14	Energi berkelanjutan	2	3
15	Kebakaran hutan	2	2
16	Hak dan kepemilikan sumberdaya	2	3
17	Perdagangan dan bisnis	1	2
18	Promosi wisata/ekowisata	2	2
19	Daerah tujuan wisata	3	1
20	Kebudayaan dan kearifan tradisional	2	3
21	Pertumbuhan populasi		

Catatan - tinggi 3; sedang 2; rendah 1



ISBN 978-954-400-616-7



**SAMPLE**

9 789544 006167